



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN
DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI KASUS PADA DPRD
KABUPATEN PURWOREJO)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

PERPUSTAKAAN
UNNES

Oleh
Nurul Fitri 'Amalia
7211409051

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Mei 2013



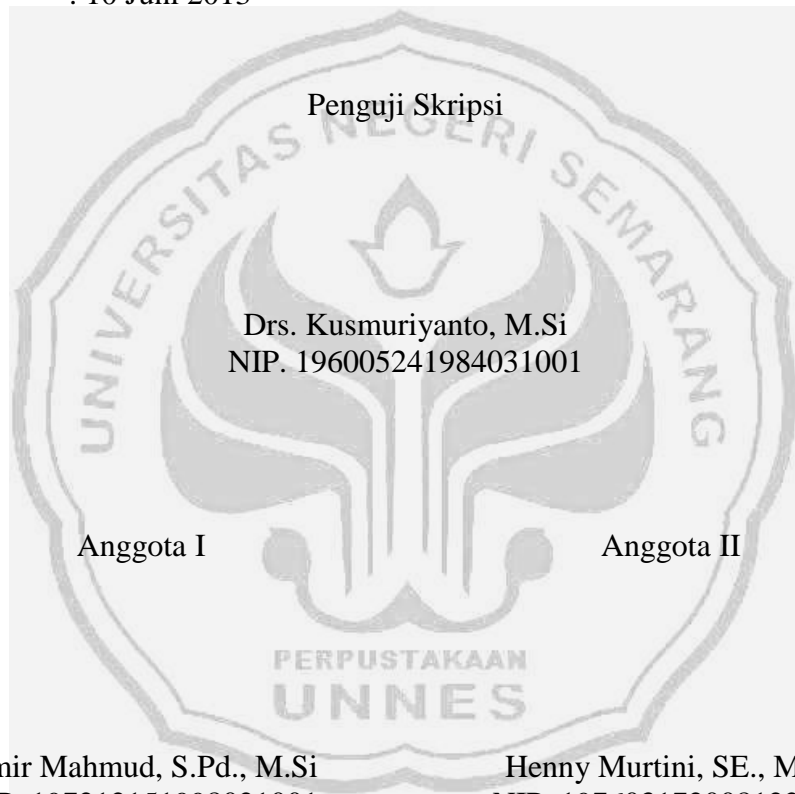
Drs. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juni 2013

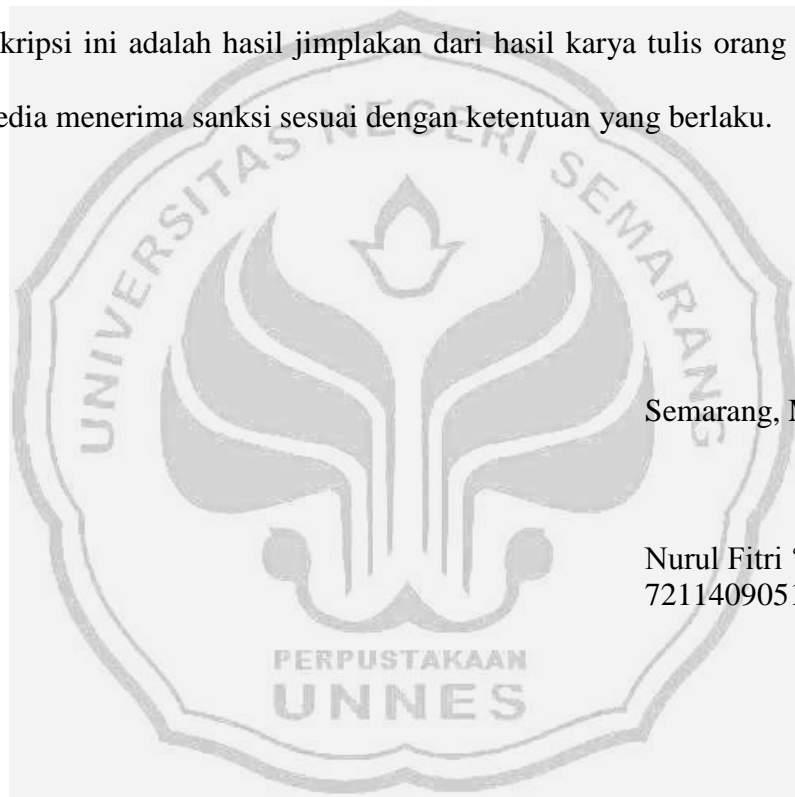


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jimplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, Mei 2013

Nurul Fitri 'Amalia
7211409051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ☞ “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153).
- ☞ “Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (Al-Insyirah: 5).

Persembahan :

- ☞ Almamaterku Universitas Negeri Semarang yang telah memberikanku ilmu yang bermanfaat sebagai bekalku di masa depan.
- ☞ Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga. Bapak dan Ibu adalah motivator dalam setiap kesuksesanku.
- ☞ Adik–adikku tercinta, Mufi dan Sasa, semangatmu adalah semangat untukku.
- ☞ Mas Wahyu Teguh Haryanto, atas setiap doa, semangat dan semua suka duka.
- ☞ Sahabat–sahabatku, Cikiciew, LAYs, KCC, kost Rumah Warna dan keluarga BEM KMFE UNNES 2011 dan 2012.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo).”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Strata 1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Ekonomi. Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan keterbatasan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materiil hingga tersusunnya skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Dr. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi yang baik.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan iji kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Henny Murtini, SE., M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Kusmuriyanto, M.Si, ketua dosen penguji yang bersedia menguji dan memberi masukan serta arahan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Drs. Subowo, M. Si, Sebagai dosen wali Akuntansi B 2009 atas bimbingan dan arahan kepada kami semua.
8. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Akuntansi 2009 yang telah membantu dan memberi semangat.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moriil maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terkira dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan mahasiswa akuntansi pada khususnya.

Semarang, Mei 2013

Penulis

SARI

‘Amalia, Nurul Fitri. 2013. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Amir Mahmud, S.Pd.,M.Si. II Henny Murtini, SE., M.Si.

Kata Kunci : *Personal Background, Political Background, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Peran Anggota DPRD, Pengawasan Keuangan Daerah.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background, political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta-fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam peran dan aktivitas politik.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Variabel independennya adalah pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, lama kerja di pemerintahan, pengalaman di DPRD, jabatan di partai politik dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Data berhasil dikumpulkan berasal dari 43 responden yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kedua, pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketiga, lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keempat, pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kelima, jabatan di partai politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keenam, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya hendaknya instrumen penelitian untuk variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, pengalaman di DPRD perlu dikembangkan. Pengukuran variabel lama kerja di pemerintahan lebih dikembangkan dan menambah indikator yang lebih tepat

ABSTRACT

‘**Amalia, Nurul Fitri.** 2013.“ The factors influence role members of DPRD on financial region supervision(Case Studies at Purworejo Regency)”. Final Project.Accounting Department. Faculty of Economics, State University of Semarang. Advisor Amir Mahmud, S.Pd.,M.Si, Co Advisor Henny Murtini, SE., M.Si.

Keywords :*Personal Background, Political Background, Knowledge of Council about Budget, the Role Members of DPRD, Financial Region Supervision.*

This study aims to examine the influence of personal background, political background and knowledge of council about budget towards the role members of DPRD on financial region supervision. This research is motivated by the fact individual background will effect to individual behavior for their role and on political activity.

Dependent variable in this research are the role members of DPRD on financial region supervision. Independent variables are education and training, organizational experience, length of employment in government, experience in DPRD, positions in political parties and knowledge of council about budget. The data in this research consist of primary data that taken from questionnaires distributed directly to respondents. The collected are from 43 respondents that members of DPRD at Purworejo Regency. Hypothesis of this study are examine by using Multiple Linear Regression.

The result of this indicated that's, first, education and training haven't effect towards the role members of DPRD on financial region supervision. Second, organizational experience haven't effect towards the role members of DPRD on financial region supervision. Third, length of employment in government haven't effect towards the role members of DPRD on financial region supervision. Fourth, experience in DPRD haven't effect towards the role members of DPRD on financial region supervision. Fifth, positions in political parties affect towards the role members of DPRD on financial region supervision. Sixth, knowledge of council about budget affect towards the role members of DPRD on financial region supervision.

The suggestions for further research, research instrument of variable education and training, organizational experience, experience in DPRD should be developed. Measurement of variable length of employment in government should be developed.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
2. LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Landasan Teori	11

2.1.1 Teori Peran (<i>The Role Theory</i>)	11
2.1.2 Teori Peran (<i>Agency Theory</i>).....	15
2.1.3 Pengawasan Keuangan daerah.....	16
2.1.3.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Pendidikan dan Pelatihan	30
2.1.4 Pendidikan dan Pelatihan.....	34
2.1.5 Pengalaman Organisasi.....	36
2.1.6 Lama Kerja di Pemerintahan	37
2.1.6 Pengalaman di DPRD	38
2.1.7 Jabatan di Partai Politik	39
2.1.8 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.....	40
2.1.9 Penelitian Terdahulu	42
2.1.10 Kerangka berpikir.....	47
2.1.10.1 Pengaruh Pendidikan dan pelatihan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	47
2.1.10.2 Pengaruh Pengalaman Organisasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	48
2.1.10.3 Pengaruh Lama Kerja di Pemerintahan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.....	49
2.1.10.4 Pengaruh Pengalaman di DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	50
2.1.10.5 Pengaruh Jabatan di Partai Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	51

2.1.10.6 Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	52
2.1.11 Hipotesis Penelitian	54
3 METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Populasi	55
3.3 Variabel Penelitian.....	57
3.3.1 Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y).....	57
3.3.2 Variabel Independen (X)	58
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.5 Uji Kualitas Data	62
3.5.1 Uji Validitas	62
3.5.2 Uji Reliabilitas	62
3.6 Metode Analisis Data	62
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	62
3.6.1.1 Tingkat Pendidikan dan Pelatihan	62
3.6.1.2 Tingkat Pengalaman Organisasi.....	63
3.6.1.3 Tingkat Pengalaman di DPRD	64
3.6.1.4 Tingkat Jabatan di Partai Politik	65
3.6.1.5 Tingkat Pengetahuan Dewan tentang Anggaran	66
3.6.1.6 Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah	67
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	67

3.6.2.1 Uji Normalitas	67
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas	68
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas	68
3.6.3 Analais Regresi Berganda	69
3.6.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	69
3.6.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)	70
4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Hasil Penelitian	71
4.1.1 Demografi Responden Penelitian	71
4.1.1.1 Jenis Kelamin	71
4.1.1.2 Stata Pendidikan	72
4.1.1.3 Jabatan di Partai Politik	73
4.1.2 Uji Kualitas Data	73
4.1.3 Uji Validitas	74
4.1.4 Uji Reliabilitas	76
4.1.5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	77
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	80
4.1.3.1 Uji Normalitas	80
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas	83
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas	85
4.1.5 Hasil Analisis Regresi Berganda	86
4.1.5.1 Uji Parsial (Uji t)	86
4.1.5.2 Koefisien Deteminasi (R^2)	92

4.2	Pembahasan	93
4.2.1	Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	93
4.2.2	Pengaruh Pengalaman Organisasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	94
4.2.3	Pengaruh Lama Kerja di Pemerintahan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	95
4.2.4	Pengaruh Pengalaman di DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	96
4.2.5	Pengaruh Jabatan di Partai Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	96
4.2.6	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah	97
5	PENUTUP	99
5.1	Simpulan	99
5.2	Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	101

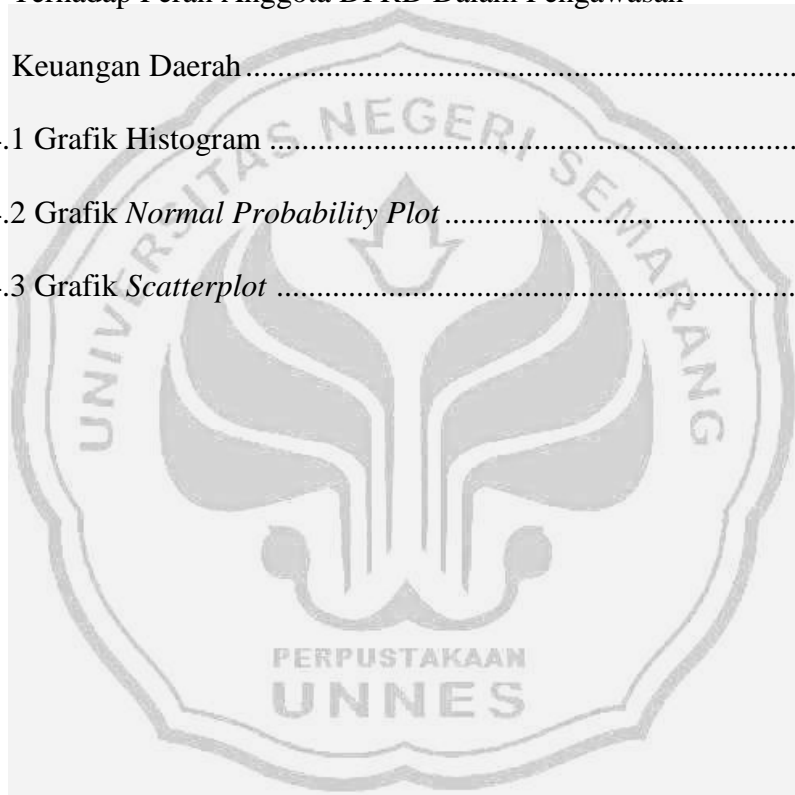
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	56
Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan dan Pelatihan (PP)	63
Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman Organisasi (PO)	64
Tabel 3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman di DPRD (PD)	65
Tabel 3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Jabatan di Partai Politik (Jab)	66
Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (PDTA)	66
Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Variabel Peran Anggota Dewan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (PADPKD).....	67
Tabel 4.1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Strata Pendidikan	72
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Jabatan di Partai Politik	73
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Uji Validitas.....	75
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas	76
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	78
Tabel 4.7 <i>Descriptive Statistics</i>	83
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas	84
Tabel 4.9 <i>Coefficients</i>	87
Tabel 4.10 Model Summary	92

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir <i>Personal Background, Political Background</i> dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.....	53
Gambar 4.1 Grafik Histogram	81
Gambar 4.2 Grafik <i>Normal Probability Plot</i>	82
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	85



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	105
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian DPRD Purworejo	106
Lampiran 3 Format Kuesioner	107
Lampiran 4 Tabulasi Perhitungan Kuesioner-Variabel Penelitian.....	114
Lampiran 5 Ringkasan Hasil Uji Validitas	130
Lampiran 6 Output Uji Validitas dan Reliabilitas	133
Lampiran 7 Output Statistik Deskriptif.....	146
Lampiran 8 Output Uji Asumsi Klasik	149
Lampiran 9 Output Hasil Analisis Regresi Berganda	152



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memulai era baru dalam kehidupan masyarakatnya yang menyebabkan terjadinya reformasi dalam segala bidang yang didukung penuh oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reformasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu didukung dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan mengatur semua urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah masing-masing. Hal ini bertujuan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat seimbang dan merata, serta dapat tercipta kesinambungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APDB). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, memberikan dampak positif bagi pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsinya, yaitu sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahannya, sebagai syarat utamanya adalah mengutamakan akuntabilitas dan transparansi serta didukung dengan pengawasan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh

dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

DPRD memegang peran yang sangat besar dalam pengawasan keuangan daerah ini. DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu, program kerja yang rancang dalam anggaran belum sesuai dengan prioritas daerah dan mengakibatkan terbuka peluang yang besar permasalahan anggaran seperti penyelewengan anggaran. Lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh system politik dan individu sebagai pelaku politik (Sastroatmodjo, 1995).

Berdasarkan penjelasan tentang peran DPRD sebagai legislatif dalam melaksanakan salah satu fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah tersebut, pada kenyataannya masih terjadi banyak kasus dan penyalahgunaan yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di pemerintah Kabupaten Purworejo. Diantaranya adalah korupsi APBD oleh Bupati Purworejo pada tahun 2004 yang

penanganannya masih berlangsung sampai tahun 2010 (InfoKorupsi.com, November 2012). Selain itu kasus korupsi dana fasilitas APBD pada tahun 2006 oleh Bupati Purworejo. Kasus ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2,517 miliar (InfoKorupsi.com, November 2012). Selain kasus-kasus tersebut, masih terdapat kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp283.734.000. kasus ini terjadi tahun 2005-2010 dan terungkap pada bulan Agustus 2010. Tersangka diduga melakukan kesalahan karena mencairkan pinjaman sendiri dan menerima setoran dari nasabah (Purworejo Online News, Mei 2011).

Permasalahan tersebut dapat timbul dapat dikarenakan kurangnya peran DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD). Salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi pengawasan. Dalam pendekatan behaviorisme, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Oleh karena itu untuk menelaah perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukanlah lembaganya, melainkan yang ditelaah adalah latar belakang individu yang menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Dalam penelitian ini yang terkait dengan perilaku individu adalah peran anggota DPRD. Latar belakang individu dalam penelitian ini adalah *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Personal background merupakan variabel individu yang merupakan latar belakang individu yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini *Personal background* yang dimaksud adalah Strata Pendidikan, Pengalaman

organisasi, dan lama kerja di pemerintahan. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya setiap individu. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi/ lembaga. Oleh karena itu, harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murni dan Witono (2003) variabel *Personal background* yang meliputi strata pendidikan dan latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan Winarna dan Murni (2007) menunjukkan bahwa variabel *Personal background* yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan menunjukkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel *Personal background*, yaitu strata pendidikan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menguji kembali hasil penelitian dari Witono dan Murni (2007). Dalam penelitian sebelumnya, *personal background* yang terdiri dari indikator jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan dan latar belakang pekerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan indikator variabel itu menjadi variabel independen. Variabel independennya adalah strata pendidikan, pengalaman organisasi dan lama kerja di pemerintahan. Variabel ini mengadopsi dari penelitian Winarna dan Murni (2007).

Political background merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. *Political background* dalam penelitian ini meliputi Pengalaman di DPRD dan jabatan di parpol. Setiap anggota dewan diwajibkan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh komisi masing masing, sehingga dengan latar belakang politik setiap individu yang berbeda tersebut, menyebabkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislative, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik, dan sifat pemilih (La Palombara 1974, dalam Winarna dan Murni 2007). Menurut studi yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), variabel *Political background* secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa variabel *Political background* yang meliputi pengalaman di DPRD, asal partai politik, dan asal komisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Winarna dan Murni (2007), indikator *political background* adalah pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, asal komisi. Dalam penelitian ini, peneliti menguji kembali hasil penelitian Winarna dan Murni (2007) dan mengadopsi saran variabel dari penelitian tersebut dengan menggunakan indikator *political*

background menjadi variabel independen. Variabel-variabel tersebut adalah pengalaman di DPRD dan Jabatan di Partai Politik.

Selain variabel *personal background* dan *political background* terdapat faktor lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD) (Dewi, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasirwan (2009) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang *fenomena gap* dan *riset gap* diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah pengalaman organisasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah lama kerja di pemerintahan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah pengalaman di DPRD berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
5. Apakah jabatan di partai politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?
6. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman organisasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh lama kerja di pemerintahan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman di DPRD terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh jabatan di partai politik terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

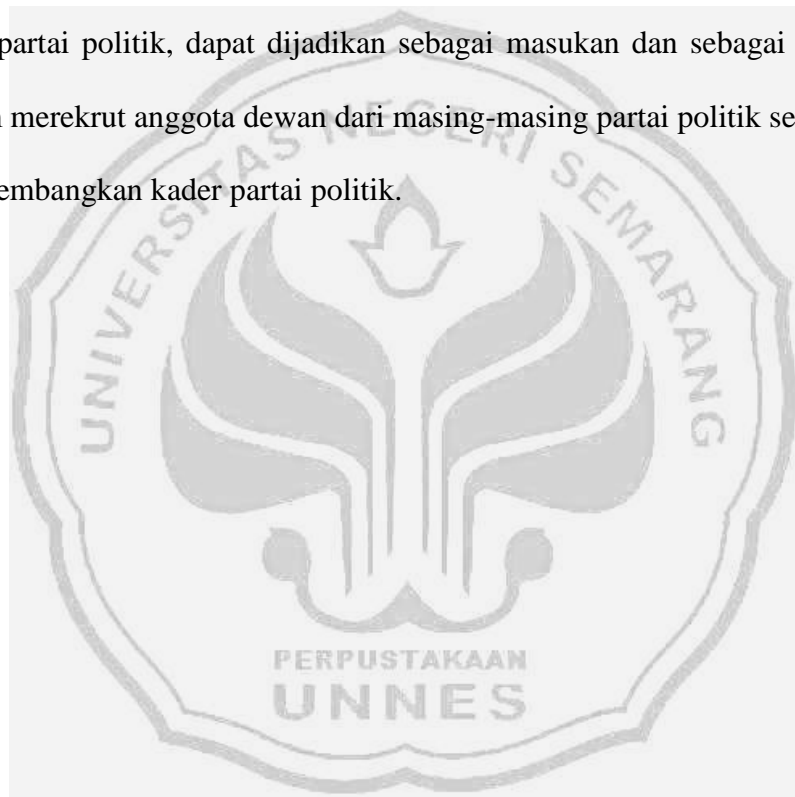
1. Dapat dijadikan sebagai tambahan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimana peran DPRD dalam melakukan tugas pengawasan keuangan daerah dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD.

2. Bagi DPRD sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD yaitu pengawasan, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga DPRD diharapkan dapat membuat program kerja yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan peranannya, serta dapat menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Bagi partai politik, dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai tolok ukur dalam merekrut anggota dewan dari masing-masing partai politik serta untuk mengembangkan kader partai politik.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran (*The Role Theory*)

Teori peran (*the role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran merupakan bagian dari teori psikologi sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (Kartikasari, 2012). Teori peran (*the role theory*) merupakan bagian dari Teori Psikologi Sosial.

Menurut Hartley dan Hartley (1961:1) dalam Walgito (1999) memberikan definisi mengenai psikologi sosial sebagai berikut: “*social psychology is that branch of the social sciences which seek to understand individual behavior in the context of social interaction*”. Dari pengertian ini dapat dikemukakan bahwa Hartley dan Hartley ingin melihat perilaku individu dalam konteks interaksi sosial. Adapun sasaran penelitian psikologi sosial adalah perilaku individu.

Menurut Sugiyo (2006) terdapat empat pendekatan teoritis utama dalam menjelaskan fenomena termasuk didalamnya perilaku sosial, antara lain:

1. Pendekatan biologis

Manusia dilahirkan dengan berbagai karakteristik biologis yang berperan menentukan perilaku. Karakteristik biologis setiap manusia berbeda-beda. Karakteristik biologis yang dimiliki oleh setiap individu membatasi individu tersebut dalam perilaku dan rangsangan yang timbul dari perilaku tersebut. Selain

itu, pendekatan biologis juga memfokuskan pada perbedaan genetik individu yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

2. Pendekatan belajar (*Behavioristik*)

Pendekatan belajar sebagai dasar dari pendekatan behaviorisme, yakni individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Pendekatan belajar ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada perilaku individu dalam suatu masyarakat/ organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam pendekatan belajar (*behavioristik*) adalah *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

3. Pendekatan insentif

Menurut pendekatan insentif orang akan berperilaku berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diperolehnya. Jika dibandingkan dengan pendekatan belajar yang lebih memfokuskan pada pengalaman belajar sebelumnya, pendekatan insentif lebih memfokuskan pada keuntungan atau kerugian yang akan di dapatkan di masa depan.

4. Pendekatan kognitif

Pendekatan kognitif memandang perilaku seseorang ditentukan oleh persepsinya terhadap situasi sosial. Pendekatan kognitif lebih menekankan pada interpretasi dan organisasi konseptual, mengenai fenomena yang terjadi sekarang, bukan masa lalu, ataupun masa depan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, psikologi sosial mempelajari perilaku atau tingkah laku individu. Perilaku individu akan mempengaruhi peran individu tersebut dalam suatu organisasi atau kelompok. Anggota DPRD dalam hal ini sebagai individu dalam kelompok sosial melakukan dalam kegiatan politik, maka perilaku anggota dewan tersebut akan mempengaruhi perannya dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan dengan pendekatan belajar (*behavioristik*), tingkah laku manusia dipengaruhi oleh apa yang telah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya, dalam penelitian ini strata pendidikan, pengalaman organisasi, lama kerja di pemerintahan dan tingkah laku anggota DPRD dipengaruhi oleh *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Oleh karena itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, variabel *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah.

Teori peran (*the role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran merupakan bagian dari teori psikologi sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (Kartikasari, 2012). Teori peran lebih menekankan pada perspektif perilaku individu, dimana interaksi sosial sebagai perilaku individu yang berkaitan dengan posisi sosial tertentu. Menurut Biddle dan Thomas (1996) dalam Kartikasari (2012) membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah yang menyangkut : a) orang-orang yang mengambil bagian dari interaksi sosial, b)

perilaku yang muncul dari interaksi tersebut, c) kedudukan orang-orang dalam perilaku, d) kaitan orang dengan perilaku.

Status atau kedudukan merupakan posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Menurut Dhohiri, dkk (2006), umumnya terdapat tiga macam cara memperoleh status/kedudukan dalam masyarakat, yaitu: *ascribed status*, *achieved status* dan *assigned status*. *Ascribed status* merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan diperoleh karena ia dilahirkan dari orang tua yang berdarah bangsawan. *Achieved status* merupakan status/kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, kedudukan seseorang menjadi anggota DPRD diperoleh dengan usaha dan memenuhi syarat sehingga ia dapat dipilih oleh masyarakat. Sedangkan *assigned status* merupakan status atau kedudukan yang diberikan. Misalnya, gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran seseorang berhubungan erat dengan perilaku seseorang berdasarkan dengan kedudukan yang dimiliki. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat harus memahami peran masing-masing supaya dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah suatu teori yang digunakan dalam berbagai kajian penelitian dalam ranah ilmu ekonomi, baik ilmu manajemen, perilaku, keuangan maupun administrasi publik (Yuhertiana, 2010). Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu pihak pemilik (*prinsipal*) dengan pihak pengelola (*agen*).

Teori keagenan apabila dihubungkan dengan akuntansi sektor publik berarti masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus pemilik (*owner*) dan pelanggan (*customer*). Pemerintah daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil sevice*) atau dengan kata lain sebagai manajemen. Dalam organisasi sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai agen dan publik atau masyarakat berperan sebagai *prinsipal* yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal (Mayasari, 2012).

Dalam perspektif keagenan, Pemerintah Daerah atau eksekutif adalah merupakan agen, dan DPRD atau legislatif sebagai prinsipal (Werimon, dkk, 2007). Pemerintah daerah yang berperan sebagai agen diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan dengan baik. Sedangkan DPRD yang telah diberikan mandat oleh rakyat (*prinsipal*) sebagai wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi rakyat. Pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut.

2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam suatu sistem pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdapat pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu konflik yang terjadi antara lembaga-lembaga yang ada dalam suatu pemerintahan tersebut dan perlu dibentuk suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan mengimbangi antara satu sama lain. Pembagian kekuasaan dalam sistem Pemerintah Daerah yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/ Kepala daerah sebagai pihak Eksekutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Sehingga dengan fungsi dan kedudukan yang telah dijelaskan tersebut, kedua lembaga tersebut, baik DPRD maupun pemerintah daerah harus dapat menjalankan tugas dengan baik, kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan dan tidak saling menjatuhkan, tetapi harus dapat menciptakan dan memelihara suatu kerjasama yang baik. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, dimana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula sebaliknya parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik selanjutnya disebut dengan *good governance* dalam

rangka mewujudkan tujuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakatnya guna menjamin suatu kepuasan masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Sebagai unsur lembaga Pemerintah daerah, DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD) (Dewi, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Dijelaskan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, antara lain:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.
2. Fungsi Penganggaran, Proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah.
3. Fungsi Pengawasan, Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah).

Dari penjelasan diatas, fungsi DPRD ada tiga, yang pertama adalah fungsi legislasi. Dalam suatu pemerintahan yang memiliki satu tujuan, visi dan misi yang

hendak dicapai, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki suatu hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan ini tercermin dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan daerah, seperti peraturan daerah. Hal ini tercermin dalam pemerintah daerah yang melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dan DPRD sama-sama bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu otonomi daerah, sehingga dapat terwujud suatu hubungan kerja yang baik dan saling mendukung satu sama lain, bukan untuk mentingkan kepentingan golongan tertentu dan menjadi pesaing untuk menjatuhkan lembaga tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Abduh, September, 2009).

Fungsi Legislasi yaitu fungsi DPRD membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan proses perumusan kebijakan publik, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan bersifat formal untuk mengatur jalannya suatu sistem pemerintah daerah yang baik, maka substansi dari peraturan daerah ini memuat semua peraturan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan hal-hal yang diatur. Hal ini sesuai dengan latar belakang DPRD, dimana DPRD

adalah wakil rakyat yang mampu menampung aspirasi rakyat dan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi rakyat tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga peraturan-peraturan yang disusun tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat.

Syahrudin dan Taifur (2002) menjelaskan bahwa sebagai partner pemerintah daerah dan DPRD mempunyai wewenang dalam pembuatan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini DPRD memegang peranan yang besar dalam hal pengesahan Peraturan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi DPRD yang kedua adalah fungsi penganggaran. Proses penganggaran merupakan proses perhitungan, penyusunan dan penetapan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam proses penganggaran ini, DPRD mempunyai fungsi yang sangat besar. DPRD harus bertindak secara aktif, proaktif dan selektif, karena DPRD menjadi legitimator Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang kemudian disebut dengan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah supaya menjadi APBD yang sah.

Berdasarkan Penjelasan Laksono (2009) dalam Dewi (2011) peran parlemen dalam penetapan APBD sangatlah penting. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu :

- a. Perlunya mekanisme “*checks and balances*” dalam hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (Parlemen) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

b. Aspek keterbukaan atau transparansi. Biasanya mekanisme perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lebih tertutup dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung di DPRD. Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa peran DPRD dalam penetapan APBD bertujuan untuk menciptakan suatu transparansi dan keterbukaan dalam perumusan kebijakan bagi publik, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung membuka peluang bagi pihak luar dan partisipasi masyarakat untuk program kerja dan kebijakan yang akan dirancang dalam APBD.

Fungsi DPRD yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah), apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Dewi, 2011).

Pengawasan menurut Undang-Undang pasal 77 Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan, bahwa DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) mempunyai fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian pada pasal 78 disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD (sebagai sebuah lembaga, bukan anggota DPRD secara individual) adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Perundang-undangan lainnya, Keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Selain Undang-undang diatas, Pengawasan terhadap anggaran juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 132 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut merupakan tindakan DPRD untuk mengawasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini dimaksudkan supaya APBD dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan efisien dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, maka DPRD melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengawasan DPRD sangat diperlukan dalam pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) karena DPRD merupakan representasi rakyat dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kebijakan publik lainnya secara konsisten. Selain itu, pengawasan memungkinkan terjadinya

hubungan timbal balik (*check and balances*) antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif (Kartikasari, 2012).

Fungsi pengawasan uang dilaksanakan oleh DPRD dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Menurut Dewi (2011) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD tersebut juga menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD antara lain :

- a. Hak Interpelasi, yaitu menggunakan usulan sekurang-kurangnya (5) lima anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kekayaan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- b. Hak Angket, yaitu sekurang-kurangnya (5) lima orang anggota DPRD dapat menggunakan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- c. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat.

Menurut Kaho (2001) dalam Dewi (2011) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi ketiga, yaitu melakukan pengawasan, DPRD mempunyai hak, antara lain:

- a. Untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Gubernur, Walikota, dan Bupati.

- b. Berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah.
- c. Melakukan pemeriksaan.
- d. Memberikan usulan-usulan.
- e. Menanyakan pertanyaan dari masing-masing anggota.

DPRD mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang penting dalam pengawasan APBD. Pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaporan. Tahapan fungsi pengawasan DPRD tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, pada tahap ini DPRD mempunyai peran dalam melakukan kegiatan antara lain: menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut, melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna), dan mengambil keputusan dan pengesahan.
- b. Pelaksanaan, peran DPRD dalam pengawasan direalisasikan melalui evaluasi terhadap APBD. Pengawasan ini dilaksanakan melalui monitoring dan pengawasan triwulan.
- c. Pelaporan, peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi lapangan.

Keuangan daerah sebagaimana yang sudah tercantum dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kemudian disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Dewi, 2011). Sumber pendanaan target yang ditetapkan dalam APBD bersumber dari pendapatan/ penerimaan daerah. Sedangkan pengeluaran dan belanja pemerintah daerah yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan sejumlah dana dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, APBD digunakan sebagai dasar kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Kawedar, dkk, 2008). APBD digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata pemerintahan pemerintah daerah.

Sejak ditetapkan pelaksanaan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBN, kemudian selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu tahun anggaran.

Menurut Kawedar, dkk (2008) dijelaskan bahwa APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk meniptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran Negara/ daerah, antara lain:

1. Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara/ daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.

6. Kas, azas ini menghendaki suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah.

APBD yang baik hendaknya disusun sesuai dengan prinsip-prinsip (azas) yang telah dijelaskan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, yaitu jalannya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Henley et al (1990) dalam Mardiasmo (2002: 68-73), mengelompokkan siklus penganggaran sektor publik menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*), pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Penjelasan tentang tahap persiapan dalam penyusunan APBD yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat dokumen tentang perencanaan daerah yang terdiri dari PROPEDA (RENSTRADA).
2. Tahap Ratifikasi Anggaran, pada tahap ini pihak eksekutif (pemerintah daerah) tidak hanya diminta untuk mempunyai kemampuan manajerial, tetapi juga harus mempunyai kemampuan di bidang politik, membangun kerjasama dan koalisi.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*), pada tahap pelaksanaan ini, APBD yang telah disahkan kemudian dilaksanakan/ diimplementasikan dalam kehidupan pemerintahan daerah, tetapi harus tetap disesuaikan dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern yang ada dalam pemerintahan daerah tersebut.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran, setelah tahap persiapan, tahap ratifikasi, dan tahap pelaksanaan, kemudian selanjutnya adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran ini tidak menemui banyak masalah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan pengawasan dijelaskan mengenai fungsi DPRD yaitu kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan bukan pemeriksaan. Dari penjelasan dalam Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Nasirwan, 2009).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan seperti itu, dapat

meminimalisir dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan anggaran.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksanaan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi) (Nasirwan, 2009).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001 dalam Nasirwan 2009). Pengawasan dilakukan dalam keseluruhan tahapan APBD, yaitu pada Tahap Persiapan, tahap Ratifikasi, tahap Pelaksanaan, tahap Pengawasan dan Akuntabilitas. Menurut Alamsyah (1997) dalam Nasirwan (2009) dijelaskan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk 1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, 2) Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 1 (h) dijelaskan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai hak meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dan semakin luas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Dewi, 2011). Sehingga dengan penjelasan tersebut, DPRD sebagai pihak legislatif dituntut untuk dapat benar-benar menjalankan fungsinya yaitu menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah tersebut secara efektif dan efisien.

2.1.3.1 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut La Palombara (1974) dalam Winarna dan Murni (2007), Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif antara lain:

1. Instistusi politik
2. Partai politik
3. Karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai dan ideologi)
4. Pengalaman politik
5. Sifat pemilih

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Winarna dan Murni (2007) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Werimon, dkk (2007) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Mayasari (2012) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD.
4. Dewi (2011) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah antara lain:

1. *Personal Background*

Personal background merupakan latar belakang diri yang melekat pada seorang individu. Latar belakang ini meliputi banyak aspek, antara lain: nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya (Dewi, 2011).

Seseorang yang memiliki *personal background* yang tinggi, maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga akan semakin baik dan maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD tersebut baik pengalaman organisasi maupun pekerjaan (Dewi, 2011). Sehingga semakin tinggi pengalaman dan keahlian seseorang, maka tugas dan fungsi yang dijalankan oleh individu tersebut juga akan semakin berkualitas.

Personal background yang dimiliki oleh individu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya individu tersebut. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007). *Personal background* yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berbeda-beda, sehingga hal ini memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing.

2. *Political Background*

Menurut Sastroatmodjo (1995), Negara adalah salah satu budaya politik atau *political background* yang berupa sebuah distribusi dari pola orientasi spesifik menjadi tujuan politik dalam lembaga politik yang ada di sebuah Negara. *Political background* tersebut merupakan pola dari perilaku individu yang berhubungan dengan kehidupan politik dalam suatu sistem politik.

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. *Political background* meliputi beberapa dimensi, yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik, dan asal komisi (Dewi, 2011). Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. *Political background* ini berkaitan dengan nilai dan nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi individu untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan penelitian Kartikaari (2012) memberikan bukti bahwa *political background* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011).

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan

dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif. Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan penelitian Winarna dan Murni (2007), memberikan bukti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2.1.4 Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Sastroatmodjo (1995) terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Faktor yang menyebabkan lemahnya peran DPRD dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan terhadap APBD adalah karena lemahnya sistem politik dan faktor individu sendiri sebagai aktor dalam politik.

Dalam pendekatan behaviorisme, individualah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Winarna dan Murni, 2007).

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Jenjang pendidikan merupakan adalah tahapan pendidikan yang di tetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan dasar: jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun perrama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah: jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi: jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Strata pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang baku mulai SD sampai dengan

perguruan tinggi dan pendidikan nonformal. Strata pendidikan ini sangat penting untuk diperhatikan karena strata pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi.

2.1.5 Pengalaman Organisasi

Organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Wikipedia, 2012). Sebuah organisasi tersebut dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.

Dalam berorganisasi setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi yang diikuti oleh individu tersebut. Supaya dapat berinteraksi dengan baik dan efektif setiap individu bias berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan.

Hubungan yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut akan menciptakan interaksi sosial. Interaksi yang baik akan tercipta apabila setiap individu memahami tugas dan peran masing-masing dalam organisasi tersebut.

dengan seperti itu, maka individu tersebut dapat berlatih berinteraksi dengan orang satu dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengalaman organisasi merupakan pengalaman seseorang menjadi anggota dalam kepengurusan suatu organisasi.

Menurut pendekatan belajar (*behavioristik*) memfokuskan perilaku seseorang berdasarkan proses belajar yang telah didapatkan sebelumnya melalui pembiasaan. Maka pengalaman organisasi yang merupakan proses pembelajaran dalam suatu organisasi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang tersebut.

2.1.6 Lama Kerja di Pemerintahan

Menurut pendekatan belajar (*behavioristik*) sebagai dasar dari pendekatan behaviorisme, yakni individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Pendekatan belajar ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada perilaku individu dalam suatu masyarakat/ organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam pendekatan belajar (*behavioristik*) adalah *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Lama kerja di pemerintahan merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh seorang individu yang bekerja dalam lingkup pemerintahan. Waktu yang dijalani oleh seseorang dalam lingkup kerja di pemerintahan juga merupakan proses belajar seseorang yang

akan memberikan pengalaman dalam suatu organisasi atau kelompok, dalam hal ini adalah lingkup pemerintahan.

Berdasarkan pendekatan belajar (*behavioristik*) tersebut, maka perilaku individu dalam suatu organisasi/ pemerintahan ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar, dalam hal ini individu tersebut memperoleh pengalaman dalam lingkup pemerintahan berdasarkan indikator lama kerja di pemerintahan.

2.1.7 Pengalaman di DPRD

Menurut Sastroatmodjo (1995), Negara adalah suatu budaya politik atau *political background* yang berupa sebuah distribusi dari pola orientasi spesifik menjadi tujuan politik dalam lembaga politik yang ada di sebuah negara. Hal tersebut merupakan pola dari perilaku individu yang berhubungan dengan kehidupan politik dalam beberapa sistem politik.

Political background merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. Dalam setiap lembaga atau instansi (DPRD/Legislatif) memiliki *political background* yang dimiliki oleh individu yang berada didalam lembaga tersebut. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu.

Setiap anggota dewan harus bertindak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dari sinilah latar *political background* menyebabkan perbedaan

sudut pandang bahkan dapat menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan antar anggota. Setiap anggota dewan harus mempunyai *political background* yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan.

Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Dalam suatu tata pemerintahan seperti DPRD terdiri dari anggota DPRD yang bervariasi, ada orang-orang yang baru saja pertama kali terpilih menjadi anggota dewan, ada anggota dewan yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya, bahkan ada pula yang merupakan orang-orang baru dalam suatu dunia perpolitikan.

2.1.8 Jabatan di Partai Politik

Status atau kedudukan merupakan posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Menurut Dhohiri, dkk (2006), umumnya terdapat tiga macam cara memperoleh status/kedudukan dalam masyarakat, yaitu: *ascribed status*, *achieved status* dan *assigned status*. *Ascribed status* merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang melalui kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan diperoleh karena ia dilahirkan dari orang tua yang berdarah bangsawan. *Achieved status* merupakan status/kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, kedudukan seseorang menjadi anggota DPRD diperoleh dengan usaha dan memenuhi syarat sehingga ia dapat dipilih oleh masyarakat. Sedangkan *assigned status* merupakan status atau kedudukan yang diberikan. Misalnya, gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa.

Jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

DPRD dapat melaksanakan perannya dengan baik apabila setiap anggota dewan mengetahui dan memahami tugas, hak dan wewenangnya masing-masing dan mampu mengaplikasikannya untuk mewujudkan *good governance* (tata pemerintah yang baik).

2.1.9 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan persepsi anggota dewan tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Winarna dan Murni, 2007). Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang sesuatu menjadi dasar bagi siapapun dalam melakukan tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan

terntang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011).

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif. Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Yudoyono (2000) dalam Dewi (2011) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan,

teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam peran anggota DPRD terhadap anggaran maka pengetahuan dasar tentang anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja dan kapabilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah/ APBD. Sehingga sudah seharusnya setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang luas tentang anggaran daerah tersebut, sehingga dengan seperti itu dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD tersebut dalam melakukan salah satu tugasnya, yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) menguji pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sampel penelitian terdiri dari 85 anggota panitia anggaran DPRD se-eks Karisidenan Surakarta yang meliputi 7 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan Kota Surakarta dan Kabupaten/ Kota se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi 5 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variable independennya adalah *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *personal background* dan *political background* secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Werimon, dkk (2007) bertujuan menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran, sedangkan variabel independennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD se-propinsi Papua periode 1999-2009, diperoleh dengan menggunakan teknik *Purposive Random Sampling*. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 313. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan *multiple regression* untuk masing-masing sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Kedua*, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). *Ketiga*, interaksi antara

pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).Keempat, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010), menguji tentang hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, variabel independennya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan variabel moderatingnya adalah komitmen organisasi politik, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Karisidenan kedua, meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.Hasil dari penelitian ini adalah pertama,pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Kedua,interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).Ketiga,interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).Keempat, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat

berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Kelima, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background*, *political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas politik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *personal background*, *political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur. Sedangkan variabel dependennya adalah kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarlang langsung kepada responden, anggota DPRD Kabupaten dan Kota se-Eks Karisidenan Semarang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, *personal background* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Kedua, *political background* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan

daerah (APBD).Ketiga,pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).Keempat,pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012).Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *personal background*, *political background*, dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.Variabel independennya adalah tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi, dan pemahaman regulasi.Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden yang disebarkan secara langsung.Data berhasil dikumpulkan berasal dari 37 responden yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali.Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.Kedua, bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.Ketiga, latar belakang pekerjaan

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keempat, pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kelima, asal parpol berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keenam, asal komisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketujuh, pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2.1.11 Kerangka Berpikir

2.1.10.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini pendidikan yang dimaksud adalah strata pendidikan anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2009-2014 yaitu tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang telah baku mulai SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan nonformal. Sedangkan pelatihan merupakan sejumlah pelatihan yang pernah diikuti oleh anggota dewan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas anggota dewan dalam pelaksanaan fungsinya.

Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk diperhatikan karena pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi. Peran dalam penelitian ini merupakan peran anggota DPRD dalam

pengawasan keuangan daerah. Peran, pola pikir dan tindakan seseorang yang mempunyai strata pendidikan yang tinggi akan sangat berbeda dengan peran, pola pikir dan tindakan seseorang yang mempunyai strata pendidikan yang rendah. Contohnya, Jika dalam suatu organisasi ada dua orang anggota yang mempunyai strata pendidikan yang berbeda. Orang pertama merupakan lulusan sarjana dan orang kedua merupakan lulusan SMP, maka pola pikir, tindakan dan peran orang tersebut pasti akan berbeda, karena dua orang tersebut menjalani proses belajar yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar (*behavioristik*), yaitu pendekatan yang memfokuskan pada perilaku individu dalam suatu masyarakat/ organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Hal ini juga berlaku bagi peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Contohnya, anggota dewan lulusan sarjana dan lulusan jenjang pendidikan yang lebih rendah akan mempunyai perilaku yang berbeda. Seperti dalam hal pengetahuan tentang pemerintah, keuangan daerah dan keseluruhan tentang pengawasan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan seorang anggota dewan akan mempengaruhi peran anggota DPRD tersebut dalam pengawasan keuangan daerah.

2.1.10.2 Pengaruh Pengalaman Organisasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengalaman organisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah pengalaman anggota dewan dalam berbagai organisasi yang diikuti oleh anggota dewan sebelum terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat di

DPRD. Pengalaman organisasi ini umumnya terdiri dari LSM, non LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat dan sebagainya (Dewi, 2011). Pemilihan variabel pengalaman organisasi sebagai variabel independen ini didasarkan pada saran penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007).

Berdasarkan pendekatan belajar yang memfokuskan pada perilaku individu dalam suatu masyarakat/ organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Maka dalam penelitian ini ini, perilaku seseorang/ anggota DPRD ditentukan atau dipengaruhi oleh pengalaman organisasi anggota DPRD tersebut, dimana dalam organisasi tersebut, merupakan proses belajar seseorang.

2.1.10.3 Pengaruh Lama Kerja di Pemerintahan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Lama kerja di pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama waktu yang telah dijalani oleh anggota dewan dalam lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan ini akan diukur dengan skala rasio, yaitu dengan ukuran berupa lama tahun. Pemilihan variabel lama kerja di pemerintahan sebagai variabel independen ini didasarkan pada saran penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007).

Lama kerja di pemerintahan merupakan proses belajar seseorang dalam lingkup pemerintahan, semakin lama seseorang bekerja dalam lingkup pemerintahan, maka pengalaman seseorang akan semakin banyak, hal ini akan mempengaruhi perilaku dan peran orang tersebut. Contohnya, anggota dewan yang mempunyai latar belakang bekerja di pemerintahan akan mempunyai pengalaman

yang lebih dalam lingkup pemerintahan dan pengalaman tersebut akan berbeda dengan pengalaman seseorang yang tidak mempunyai latar belakang bekerja di lingkup pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa lama kerja di pemerintahan akan berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2.1.10.4 Pengaruh Pengalaman di DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Dalam suatu tata pemerintahan seperti DPRD terdiri dari anggota DPRD yang bervariasi, ada orang-orang yang baru saja pertama kali terpilih menjadi anggota dewan, ada anggota dewan yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya, bahkan ada pula yang merupakan orang-orang baru dalam suatu dunia perpolitikan.

Pengalaman merupakan bekal yang baik dan akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu organisasi. seorang anggota DPRD yang sudah mempunyai pengalaman di DPRD akan mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai seorang anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya, yaitu dalam hal pengawasan keuangan daerah, sedangkan seorang yang belum mempunyai pengalaman, harus dilatih dahulu melalui pendidikan atau pelatihan, supaya kompeten dalam bidangnya. Dengan penjelasan tersebut, maka pengalaman di DPRD berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2012) disimpulkan bahwa pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2.1.10.5 Pengaruh Jabatan di Partai Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenang dan mampu mengaplikasikan secara baik, dan didukung dengan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang baik (Yudoyono, 2000 dalam Dewi, 2011). Seorang anggota dewan harus mampu memahami dan mengaplikasikan hak, tugas, dan wewenangnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai pihak yang diberi wewenang sebagai wakil rakyat, yang diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat supaya dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga jabatan di partai politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

2.1.10.6 Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan akan berjalan dengan efektif harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan (APBD) telah berjalan sesuai dengan sasaran, tujuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

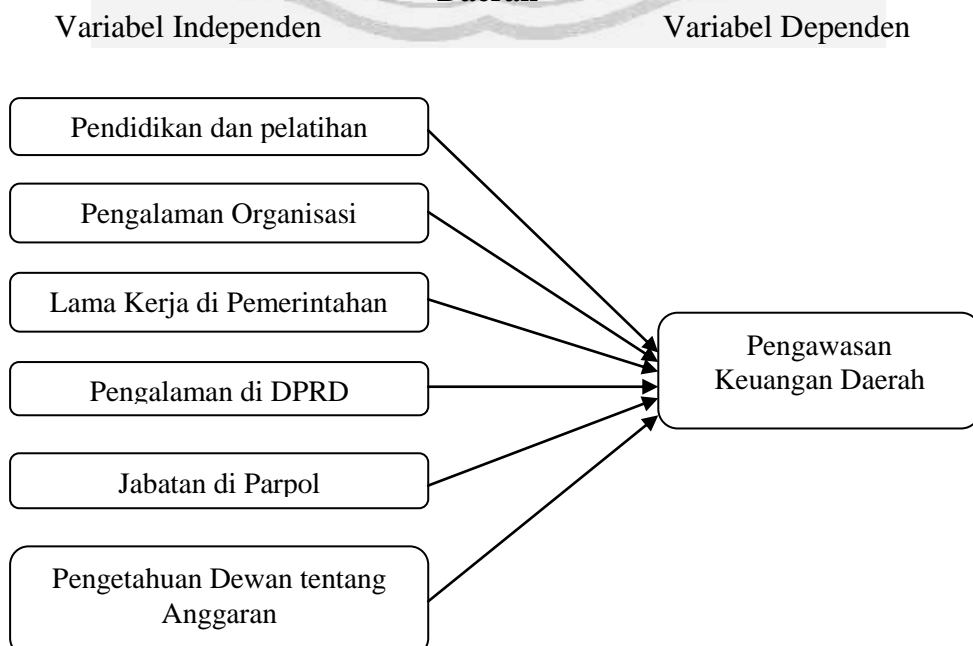
Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011).

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif. Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Kerangka berpikir ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari strta pendidikan, pengalaman organisasi, lama kerja di pemerintahan, pengalaman di DPRD, jabatan di partai politik, dan pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap variabel dependen Pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan landasan teori diatas, dapat disusun sebuah kerangka berpikir yang dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Personal Bckground, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah



2.1.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H_1 : Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. H_2 : Pengalaman organisasi berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3. H_3 : Lama kerja di pemerintahan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
4. H_4 : Pengalaman di DPRD berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
5. H_5 : Jabatan di parpol berpengaruh positif terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah.
6. H_6 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka (Arikunto, 2006). Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner yang disebarakan kepada anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2009-2014.

3.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2009-2014. Dengan menggunakan metode populasi, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2009-2014 yang berjumlah 45 orang. Pertimbangan pengambilan sampel ini dikarenakan seluruh anggota komisi DPRD tersebut mempunyai peran dalam pengawasan keuangan daerah. Pemilihan DPRD Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian karena telah terjadi sejumlah kasus korupsi dan penyimpangan anggaran yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Purworejo. Selain itu, seluruh anggota DPRD Kabupaten Purworejo diharapkan memiliki peran yang memadai dalam melaksanakan salah satu fungsi DPRD, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan.

Waktu yang di tempuh peneliti untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan penelitian adalah kurang lebih dua minggu untuk mengurus administrasi dan dua minggu untuk penyebaran kuesioner hingga kembali, sehingga total waktu penelitian yaitu kurang lebih satu bulan. Jumlah kuesioner yang di sebar sebanyak 45 kuesioner dan seluruhnya kembali. Jadi, *respons rate* responden dalam penelitian ini sebesar 100%. Dari kuesioner yang terkumpul, terdapat 2 kuesioner yang tidak dianalisis, dikarenakan kuesioner tersebut tidak diisi dengan lengkap oleh responden. Dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 43 eksemplar (95,5%). Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1.	Kuesioner yang disebar	45
2.	Kuesioner yang tidak dikembalikan	0
3.	Kuesioner yang kembali	45
4.	Kuesioner yang tidak lengkap	2
5.	Kuesioner yang diolah	43
6.	Tingkat pengembalian	100%
7.	Data yang digunakan	96%

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan bukan pemeriksaan. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Nasirwan, 2009).

Variabel dependen ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan metode pengukuran yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk member alternatif penilaian (Indriantoro & Supomo, 1999) dalam (Winarna dan Murni, 2007) yang sesuai dengan sikap dan tindakan yang dilakukan atas pernyataan yang diajukan. Pengukuran variabel dengan skala likert 1 sampai 5, yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS); 2= Tidak Setuju (TS); 3= Tidak tahu (TT); 4= Setuju (S); dan 5= Sangat Setuju (SS). Jawaban nilai tersebut memiliki nilai antara 5– 50. Dalam penelitian ini, kuesioner penelitian untuk mengukur variabel peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah mengadopsi dari penelitian Kartikasari (2012).

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Variabel independen dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan (X_1)

Strata pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh setiap anggota dewan berupa pendidikan yang baku mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi. Strata pendidikan ini sangat penting untuk diperhatikan karena strata pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tindakan dan peran seseorang dalam suatu masyarakat atau organisasi. Pengukuran variabel menggunakan skala likert yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden, reposponden akan menjawab dari Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

2. Pengalaman Organisasi (X_2)

Pengalaman organisasi yang dimaksud dalam penelitian adalah pengalaman anggota dewan dalam berbagai organisasi yang diikuti oleh anggota dewan sebelum terpilih untuk menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD. Pengalaman organisasi ini umumnya terdiri dari LSM, non LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat dan sebagainya (Dewi, 2011). Pemilihan variabel pengalaman organisasi sebagai variabel independen ini didasarkan pada saran penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni

(2007). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

3. Lama Kerja di Pemerintahan (X_3)

Lama kerja di pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama waktu yang telah dijalani oleh anggota dewan dalam lingkup pemerintahan. Lama kerja di pemerintahan ini akan diukur dengan skala rasio, yaitu dengan ukuran berupa lama tahun. Pemilihan variabel lama kerja di pemerintahan sebagai variabel independen ini didasarkan pada saran penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007). Variabel ini diukur dengan menggunakan pertanyaan terbuka yang akan dijawab oleh responden.

4. Pengalaman di DPRD (X_4)

Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Dalam suatu tata pemerintahan seperti DPRD terdiri dari anggota DPRD yang bervariasi, ada orang-orang yang baru saja pertama kali terpilih menjadi anggota dewan, ada anggota dewan yang sudah pernah menjabat pada periode sebelumnya, bahkan ada pula yang merupakan orang-orang baru dalam suatu dunia perpolitikan. Dalam penelitian ini, pengalaman di DPRD dihitung dengan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju).

5. Jabatan di Partai Politik (X_5)

Jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju). Selain itu, indikator variabel ini juga ada yang diukur dengan pertanyaan terbuka untuk indikator jenis jabatan di partai politik.

6. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X_6)

Pengawasan keuangan akan berjalan dengan efektif harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan (APBD) telah berjalan sesuai dengan sasaran, tujuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011).

Pengembangan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dari 9 item pertanyaan

mengenai pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai 5. Skala 1= STS (Sangat Tidak Setuju), skala 2= TS (Tidak Setuju), skala 3= TT (Tidak Tahu), skala 4= S (Setuju), Skala 5= SS (Sangat Setuju). Dalam penelitian ini, Kuesioner penelitian untuk mengukur variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mengadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dari responden menggunakan kuesioner, dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner atau angket merupakan suatu cara atau metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang dikenai, atau disebut responden. Maksud serta tujuan penelitian akan mempunyai pengaruh terhadap materi serta bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Kuesioner merupakan suatu alat untuk menjaring data yang ingin diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Walgito, 1990). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian Pramita dan Andriyani (2010) dan Kartikasari (2012).

Metode penyebaran kuesioner adalah dengan menggunakan *Personally Administrated Questionnaires*, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden (Dewi, 2011).

3.5 Uji Kualitas Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

3.6 Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari responden kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat statistik sebagai berikut:

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian statistika yang membicarakan cara-cara pengumpulan data dan menyederhanakan angka- angka pengamatan yang diperoleh (mengumpulkan, meringkas dan menyajikan data), serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran.

3.6.1.1 Tingkat Pendidikan dan Pelatihan

1. Rentang

Penentuan rentang kategori skor adalah nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis).

Skor maksimal adalah 7 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maksimal) = 35

Skor minimal adalah 7 (jumlah pernyataan) x 1 (skor minimal) = 7

Maka rentang sebesar $35 - 7 = 28$

2. Banyak kelas

Banyak rentang kelas adalah tiga, yaitu kategori kelas rendah, sedang dan baik.

3. Panjang interval kelas

Panjang interval diperoleh dari rentang kelas dibagi banyak kelas. Maka

panjang interval kelas = $\frac{28}{3} = 9,3 = 10$

Tabel 3.2
Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan dan Pelatihan (PP)

No.	Interval	Frekuensi	Kategori
1.	7 – 16	0	Rendah
2.	17 – 26	3	Sedang
3.	27 – 36	40	Baik

3.6.1.2 Tingkat Pengalaman Organisasi

1. Rentang

Penentuan rentang kategori skor adalah nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis).

Skor maksimal adalah 5 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maksimal) = 25

Skor minimal adalah 5 (jumlah pernyataan) x 1 (skor minimal) = 5

Maka rentang sebesar $25 - 5 = 20$

2. Banyak kelas

Banyak rentang kelas adalah tiga, yaitu kategori kelas rendah, sedang dan baik.

3. Panjang interval kelas

Panjang interval diperoleh dari rentang kelas dibagi banyak kelas. Maka

$$\text{panjang interval kelas} = \frac{20}{3} = 6,6 = 7$$

Tabel 3.3
Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman Organisasi (PO)

No.	Interval	Frekuensi	Kategori
1.	5 – 11	0	Rendah
2.	12 – 18	14	Sedang
3.	19 – 25	29	Baik

3.6.1.3 Tingkat Pengalaman di DPRD

1. Rentang

Penentuan rentang kategori skor adalah nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis).

Skor maksimal adalah 5 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maksimal) = 25

Skor minimal adalah 5 (jumlah pernyataan) x 1 (skor minimal) = 5

Maka rentang sebesar $25 - 5 = 20$

2. Banyak kelas

Banyak rentang kelas adalah tiga, yaitu kategori kelas rendah, sedang dan baik.

3. Panjang interval kelas

Panjang interval diperoleh dari rentang kelas dibagi banyak kelas. Maka

$$\text{panjang interval kelas} = \frac{20}{3} = 6,6 = 7$$

Tabel 3.4
Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman di DPRD (PD)

No.	Interval	Frekuensi	Kategori
1.	5 – 11	0	Rendah
2.	12 – 18	15	Sedang
3.	19 – 25	28	Baik

3.6.1.4 Tingkat Jabatan di Partai Politik

1. Rentang

Penentuan rentang kategori skor adalah nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis).

Skor maksimal adalah 7 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maksimal) = 35

Skor minimal adalah 7 (jumlah pernyataan) x 1 (skor minimal) = 7

Maka rentang sebesar $35 - 7 = 28$

2. Banyak kelas

Banyak rentang kelas adalah tiga, yaitu kategori kelas rendah, sedang dan tinggi.

3. Panjang interval kelas

Panjang interval diperoleh dari rentang kelas dibagi banyak kelas. Maka

$$\text{panjang interval kelas} = \frac{28}{3} = 9,3 = 10$$

Tabel 3.5
Distribusi Frekuensi Variabel Jabatan di Partai Politik (Jab)

No.	Interval	Frekuensi	Kategori
1.	7 – 16	0	Rendah
2.	17 – 26	24	Sedang
3.	27 – 36	18	Tinggi

3.6.1.5 Tingkat Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

1. Rentang

Penentuan rentang kategori skor adalah nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis).

Skor maksimal adalah 9 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maksimal) = 45

Skor minimal adalah 9 (jumlah pernyataan) x 1 (skor minimal) = 9

Maka rentang sebesar $45 - 9 = 36$

2. Banyak kelas

Banyak rentang kelas adalah tiga, yaitu kategori kelas rendah, sedang dan tinggi.

3. Panjang interval kelas

Panjang interval diperoleh dari rentang kelas dibagi banyak kelas. Maka

$$\text{panjang interval kelas} = \frac{36}{3} = 12 = 12$$

Tabel 3.6
Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (PDTA)

No.	Interval	Frekuensi	Kategori
1.	9 – 20	0	Rendah
2.	21 – 32	9	Sedang
3.	33 – 44	34	Tinggi

3.6.1.6 Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah

1. Rentang

Penentuan rentang kategori skor adalah nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis).

Skor maksimal adalah $10 \text{ (jumlah pernyataan)} \times 5 \text{ (skor maksimal)} = 50$

Skor minimal adalah $10 \text{ (jumlah pernyataan)} \times 1 \text{ (skor minimal)} = 10$

Maka rentang sebesar $50 - 10 = 40$

2. Banyak kelas

Banyak rentang kelas adalah tiga, yaitu kategori kelas rendah, sedang dan tinggi.

3. Panjang interval kelas

Panjang interval diperoleh dari rentang kelas dibagi banyak kelas. Maka

$$\text{panjang interval kelas} = \frac{40}{3} = 13,7 = 14$$

Tabel 3.7

Distribusi Frekuensi Variabel Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (PADPKD)

No.	Interval	Frekuensi	Kategori
1.	10 – 23	0	Rendah
2.	24 – 37	13	Sedang
3.	38 – 51	30	Tinggi

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal. Kalau asumsi ini dilanggarmaka uji ststistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. (Ghozali, 2011).

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji mutikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Ghozali (2011) dijelaskan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam mode regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen.
3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari : 1) nilai tolerance dan lawannya, 2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakan yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut hommoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

3.6.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variabilitas variabel dependen. (Ghozali, 2011). Menurut Ghozali (2011), cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Quick look : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ (5%), maka H_0 ditolak, Sedangkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ (5%), maka H_1 diterima.

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan keuangan Daerah

X_1 = Pendidikan dan Pelatihan

X_2 = Pengalaman Organisasi

X_3 = Lama Kerja di Pemerintahan

X_4 = Pengalaman di DPRD

X_5 = Jabatan di Partai Politik

X_6 = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

β = Koefisien Regresi

e = error

3.6.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Demografi Responden Penelitian

Data demografi responden berikut ini menyajikan beberapa informasi rinci mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Data demografi responden menunjukkan informasi jenis kelamin, strata pendidikan dan jabatan di partai politik.

4.1.1.1 Jenis Kelamin

Kondisi responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pria dan kelompok wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Demografi responden berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	35	81.4	81.4	81.4
Wanita	8	18.6	18.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dari 43 responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin pria, yaitu sebanyak 35 responden (81,4%), sedangkan responden wanita sebanyak 8 responden (18,6%).

4.1.1.2 Strata Pendidikan

Kondisi responden berdasarkan strata pendidikan yang dimiliki oleh responden dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu SMA/ sederajat, D3, S1, S2 dan S3. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan strata pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Demografi Responden Berdasarkan Strata Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/ Sederajat	11	25.6	25.6	25.6
D3 (Diploma)	4	9.3	9.3	34.9
S1 (Sarjana)	21	48.8	48.8	83.7
S2 (Master)	7	16.3	16.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dengan strata pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 11 responden (25,6%), D3 (Diploma) sebanyak 4 responden (9,3%), S1 (Sarjana) sebanyak 21 responden (48,8%) dan S2 (Master) sebanyak 7 responden (16,3%).

4.1.1.3 Jabatan di Partai Politik

Kondisi responden berdasarkan jabatan responden di partai politik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu anggota, pengurus dan ketua/ majelis partai. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran responden berdasarkan jabatan di partai politik dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Demografi Responden Berdasarkan Jabatan di Partai Politik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Anggota	25	58.1	58.1	58.1
Pengurus	12	27.9	27.9	86.0
Ketua/ Majelis Partai	6	14.0	14.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang menjabat sebagai anggota dalam partai politik sebanyak 25 responden (58,1%), responden yang menjabat sebagai pengurus dalam partai politik sebanyak 12 responden (27,9%) dan responden yang menjabat sebagai ketua/majelis partai sebanyak 6 responden (14%).

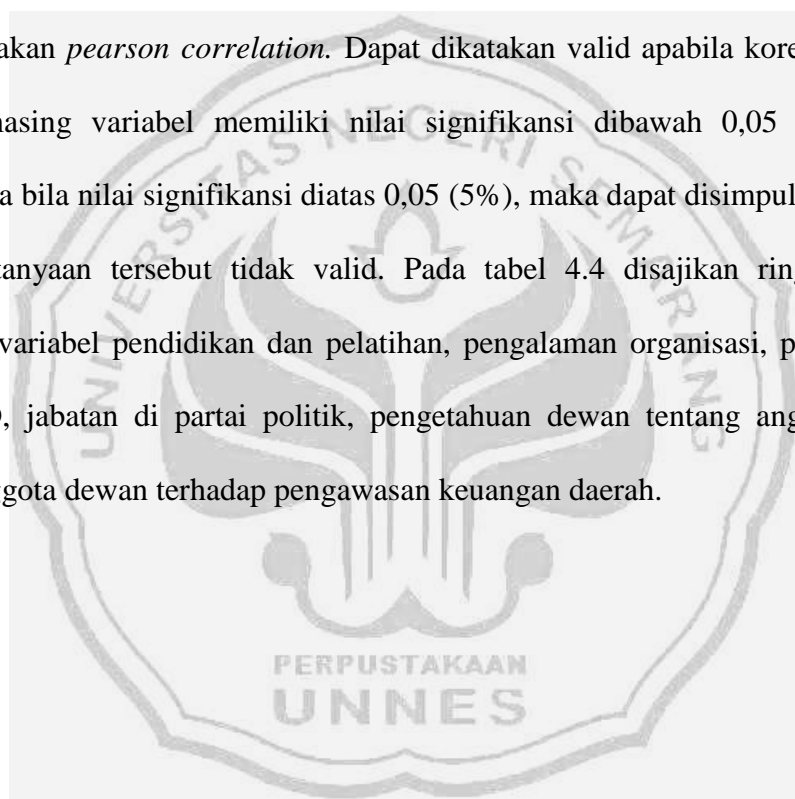
4.1.2 Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengolahan data, data yang diperoleh melalui kuesioner perlu dilakukan pengujian kualitas data. Pengujian kualitas data ini dilakukan terhadap variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, pengalaman di DPRD, jabatan di partai politik, pengetahuan dewan tentang

anggaran dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengujian kualitas data ini dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut.

4.1.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan *pearson correlation*. Dapat dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (5%), dan sebaliknya bila nilai signifikansi diatas 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan tersebut tidak valid. Pada tabel 4.4 disajikan ringkasan uji validitas variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, pengalaman di DPRD, jabatan di partai politik, pengetahuan dewan tentang anggaran dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah.



Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Uji Valliditas

No.	Variabel	Pernyataan	Keterangan
1.	Pendidikan dan Pelatihan	PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7	Valid
2.	Pengalaman Organisasi	PO1, PO2, PO3, PO4, PO5	Valid
3.	Pengalaman di DPRD	PD1, PD2, PD3, PD4, PD5	Valid
4.	Jabatan di Partai Politik	JAB1, JAB2, JAB3, JAB4, JAB5, JAB6, JAB7	Valid
5.	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	PDTA1, PDTA2, PDTA3, PDTA4, PDTA5, PDTA6, PDTA7, PDTA8, PDTA9	Valid
6.	Peran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	PADPKD1, PADPKD2, PADPKD3, PADPKD4, PADPKD5, PADPKD6, PADPKD7, PADPKD8, PADPKD9, PADPKD10,	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013.

Dari tabel 4.5 semua item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini berarti setiap item pernyataan dalam kuesioner tersebut adalah valid.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner yang reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas dengan koefisien *Cronbach's Alpha* terhadap variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, pengalaman di DPRD, jabatan di partai politik, pengetahuan dewan tentang anggaran dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pendidikan dan Pelatihan (PP)	0.742	Reliabel
2.	Pengalaman Organisasi (PO)	0.701	Reliabel
3.	Pengalaman di DPRD (PD)	0.748	Reliabel
4.	Jabatan di Partai Politik (JAB)	0.750	Reliabel
5.	Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (PDTA)	0.747	Reliabel
6.	Peran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (PADPKD)	0.760	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan oleh variabel pendidikan dan pelatihan (0,742), pengalaman organisasi (0,701), pengalaman di DPRD (0,748), jabatan di partai politik (0,750), pengetahuan dewan tentang anggaran (0,747) dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (0,760) lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, jabatan di partai politik, pengetahuan dewan tentang anggaran, dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah dapat dikatakan reliabel.

4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2006). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Alat analisis yang digunakan untuk melihat gambaran sampel data penelitian ini adalah jumlah data, nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif dari seluruh variabel-variabel penelitian yang disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-Rata	Standar Deviasi
PADPKD	43	10-50	31-49	40,02	4,073
PP	43	7-35	22-35	30,14	2,623
PO	43	5-25	16-24	19,30	1,489
PD	43	5-25	15-23	19,00	1,852
JAB	43	7-35	21-35	26,39	2,761
PDTA	43	9-45	27-45	35,19	3,960

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Variabel pendidikan dan pelatihan (PP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 30,14. Berdasarkan tabel 3.2, apabila dikategorikan dalam tiga kelompok, maka rata-rata variabel pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh anggota dewan berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 40 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD memiliki pendidikan dan pelatihan dalam kategori tinggi. Selain itu, anggota dewan yang memiliki pendidikan dan pelatihan yang dikategorikan dalam kategori sedang ada sebanyak 3 orang.

Variabel pengalaman organisasi (PO) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 19,30. Berdasarkan tabel 3.3, apabila dikategorikan dalam tiga kelompok, maka rata-rata variabel pengalaman organisasi yang dimiliki oleh anggota dewan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD memiliki pengalaman organisasi kategori tinggi, yaitu sebanyak 29 orang. Selain

itu, anggota dewan yang memiliki pengalaman organisasi yang tergolong sedang ada sebanyak 14 orang.

Variabel pengalaman di DPRD (PD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 19,00. Berdasarkan tabel 3.4, apabila dikategorikan menjadi tiga kelompok, maka rata-rata variabel pengalaman di DPRD yang dimiliki oleh masing-anggota dewan beradapada kategori tinggi, yaitu sebanyak 28 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD memiliki pengalaman di DPRD yang dikategorikan sebagai kategori tinggi. Selain itu, anggota dewan yang memiliki pengalaman di DPRD yang tergolong sedang ada sebanyak 15 orang.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel jabatan di partai politik (JAB) menunjukkan nilai rata-rata 26,39. Berdasarkan tabel 3,5, apabila dikategorikan menjadi tiga kelompok, maka rata-rata variabel jabatan di partai politik yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 24 orang. Hal berarti bahwa sebagian besar anggota dewan memiliki jabatan di partai politik yang dapat dikategorikan dalam kategori sedang. Selain itu, anggota dewan yang memiliki jabatan di partai politik yang dikategorikan pada kategori tinggi ada sebanyak 18 orang.

Variabel pengetahuan dewan terhadap anggaran (PDTA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 35,19. Dari tabel 3.6, apabila dikategorikan dalam tiga kelompok, maka rata-rata variabel pengetahuan dewan terhadap anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan berada pada kategori tinggi, sebanyak 34 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD memiliki pengetahuan terhadap anggaran yang dapat dikategorikan dalam kategori yang tinggi. Selain itu,

anggota dewan yang memiliki pengetahuan terhadap anggaran yang dikategorikan dalam kategori sedang ada sebanyak 9 orang.

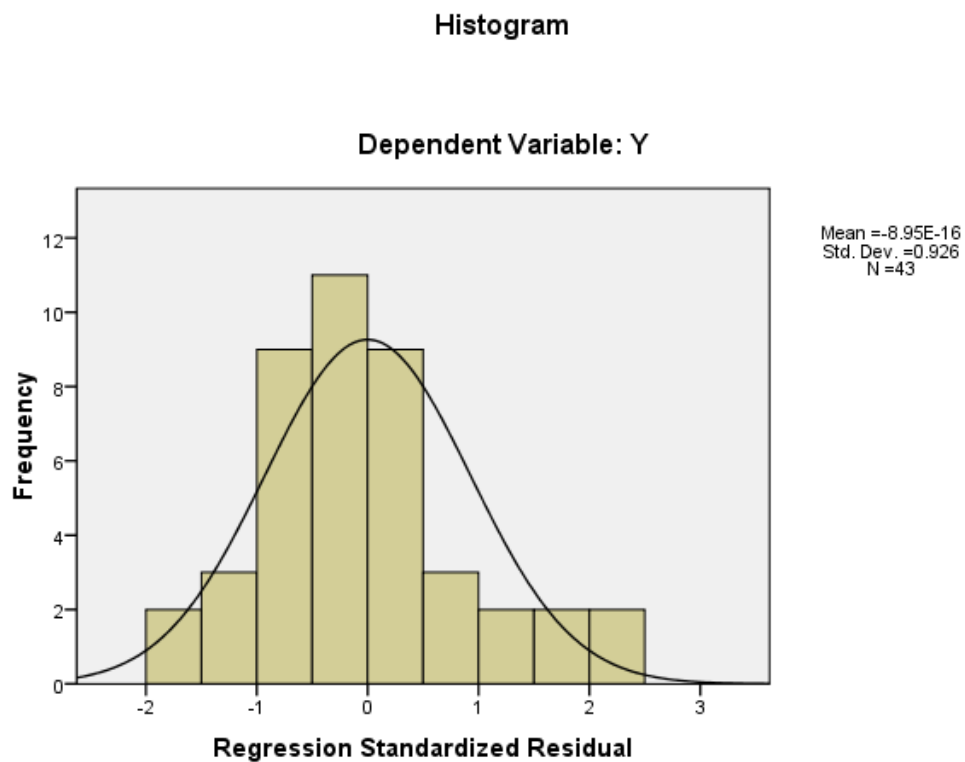
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh model analisis yang tepat. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dengan analisis grafik histogram dan melihat normal *probability plot*, nilai *skewness* dan *kurtosis*. Uji multikolinearitas dengan perhitungan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*, sedangkan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik *Scatterplot*.

4.1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji tentang model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat normalitas, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, jika hanya dengan melihat nilai histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka

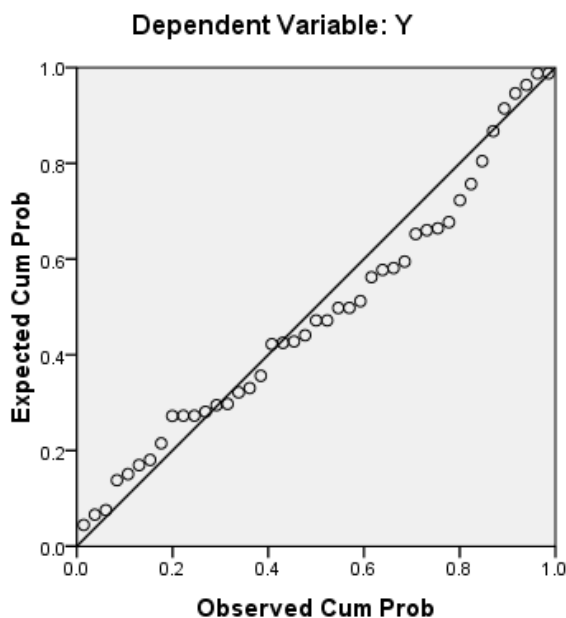
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011). Disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual. Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu histogram dan grafik normal *probability plot* dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2.



Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Gambar 4.1
Grafik histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Gambar 4.2
Grafik *Normal Probability Plot*

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik *normal probability plot* pada gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal dan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mendukung dan meyakinkan hasil uji normalitas grafik, maka dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dilakukan yaitu dengan melihat nilai *skewness* dan *kurtosis* residual. Rasio *skewness* dan *kurtosis* dapat dijadikan

petunjuk normalitas suatu data. Rasio *skewness* adalah nilai *skewness* dibagi dengan *standard error skewness*, sedangkan rasio *kurtosis* adalah nilai *kurtosis* dibagi dengan *standard error kurtosis*. Bila rasio *skewness* dan *kurtosis* berada diantara -2 dan +2, maka distribusi data adalah normal. Hasil uji normalitas rasio *skewness* dan *kurtosis* dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7

Descriptive Statistics				
	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	.655	.361	.404	.709
Valid N (listwise)				

Sumber: data primer yang diolah SPSS, 2013

$$\text{Rasio } skewness = \frac{0.655}{0.361} = 1,81$$

$$\text{Rasio } kurtosis = \frac{0.404}{0.709} = 0,56$$

Dari hasil perhitungan rasio tersebut, rasio *skewness* 1,81 dan rasio *kurtosis* berada diantara -2 dan +2, maka distribusi residual data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Oleh karena itu, uji multikolinearitas ini digunakan untuk penelitian yang mempunyai variabel bebas lebih dari satu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara

variabel bebas (independen). Hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PP	.722	1.385
PO	.808	1.238
LKP	.942	1.062
PD	.658	1.519
JAB	.564	1.774
PDTA	.668	1.498

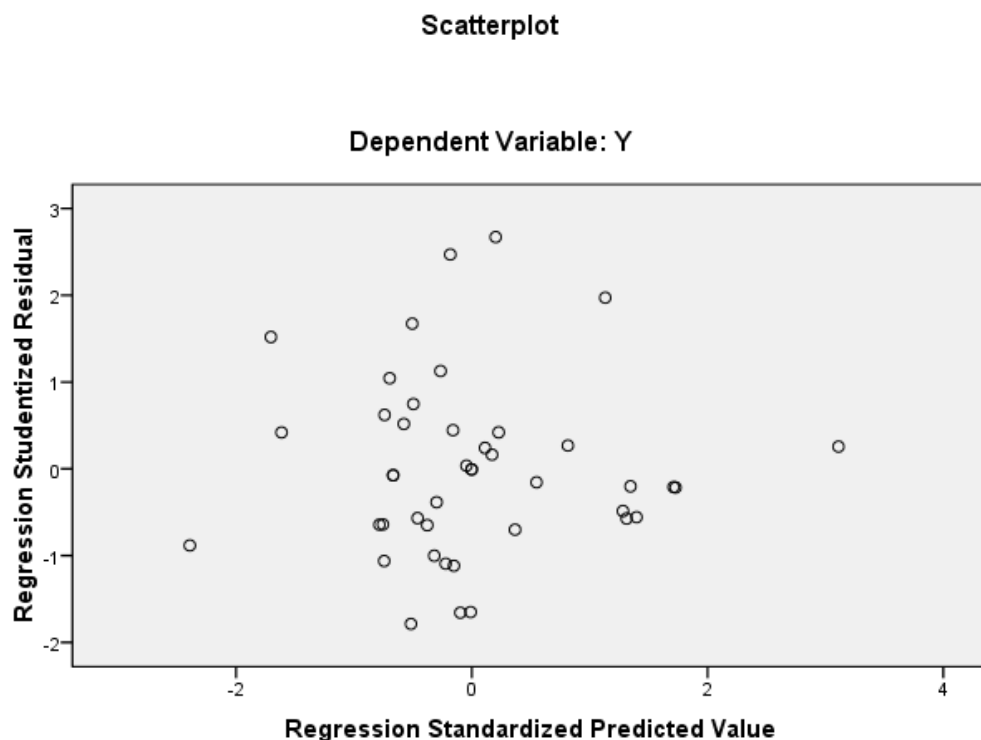
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10, maka dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk variabel independen pendidikan dan pelatihan (PP), pengalaman organisasi (PO), lama kerja di pemerintahan (LKP), pengalaman di DPRD (PD), jabatan di partai politik (JAB), pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (PADPKD) dalam model regresi.

4.1.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini.



Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013.

Gambar 4.3
Grafik Scatterplot

Dari gambar grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, serta titik-titik tersebut menyebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Hasil Anallisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pendidikan dan pelatihan (X_1), pengalaman organisasi (X_2), lama kerja di pemerintahan (X_3), pengalaman di DPRD (X_4), jabatan di partai politik (X_5), pengetahuan dewan tentang anggaran (X_6) dan peran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Perhitungan koefisien regresi dengan menggunakan SPSS 16.0 menunjukkan hasil sebagai berikut

4.1.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen (pendidikan dan pelatihan (X_1), pengalaman organisasi (X_2), lama kerja di pemerintahan (X_3), pengalaman di DPRD (X_4), jabatan di partai politik (X_5), pengetahuan dewan tentang anggaran (X_6)) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (pengawasan keuangan daerah (Y)). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai sig dengan perbandingan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.698	8.583		1.130	.266
	PP	-.077	.230	-.050	-.337	.738
	PO	.273	.382	.100	.714	.480
	LKP	.048	.258	.024	.186	.854
	PD	-.045	.341	-.020	-.131	.896
	JAB	.604	.247	.409	2.447	.019
	PDTA	.343	.158	.333	2.169	.037

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah SPSS, 2013

Hipotesis pertama menyatakan sebagai berikut “pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pendidikan dan pelatihan sebesar -0,077, serta besarnya t hitung dari variabel pendidikan dan pelatihan adalah -0,377 dengan nilai signifikansi 0,738. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan $df = n - k - 1 = 43 - 6 - 1 = 36$ pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka H_1 di tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan menolak hipotesis pertama.

Hipotesis kedua menyatakan sebagai berikut “Pengalaman organisasi berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan pengujian parsial menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pengalaman organisasi sebesar 0,273 dan besarnya nilai t hitung dari variabel pengalaman organisasi adalah 0,714 dengan nilai signifikansi sebesar 0,480. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$ pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka H_2 di tolak. Namun besarnya koefisien variabel pendidikan dan sebesar 0,273, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan menolak hipotesis kedua.

Hipotesis ketiga menyatakan sebagai berikut “lama kerja di pemerintahan berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan hasil uji parsial pada penelitian ini diperoleh nilai koefisien variabel lama kerja di pemerintahan sebesar 0,048 dan besarnya t hitung dari variabel tersebut sebesar 0,186 dengan nilai signifikansi 0,854. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$ pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka H_3 di tolak. Dengan besarnya koefisien variabel pendidikan dan sebesar 0,048, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan menolak hipotesis ketiga.

Hipotesis keempat menyatakan sebagai berikut “Pengalaman di DPRD berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pengalaman di DPRD sebesar -0,045 dan besarnya t hitung variabel I ini adalah sebesar -0,131 dengan nilai signifikansi 0,896. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$ pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel, dan nilai signifikansi lebih dari alpha (5%) maka H_4 di tolak. Dengan besarnya koefisien variabel pengalaman di DPRD bernilai negatif sebesar -0,045, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan menolak hipotesis keempat.

Hipotesis kelima menyatakan sebagai berikut “Jabatan di partai politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel jabatan di partai politik sebesar 0,604 dan besarnya t hitung variabel ini adalah sebesar 2,447 dengan nilai signifikansi 0,019. Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$ pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi kurang dari alpha (5%) maka H_5 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jabatan di partai politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan menerima hipotesis kelima.

Hipotesis keenam menyatakan sebagai berikut “pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah”. Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel jabatan di partai politik sebesar 0,343 dan besarnya t hitung variabel ini adalah sebesar 2,169 dengan nilai signifikansi 0,037. Sedangkan Sedangkan nilai t tabel untuk uji parsial ini dengan $df = n-k-1 = 43-6-1 = 36$ pada level 0,05 adalah sebesar 1,688. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi kurang dari alpha (5%) maka H_6 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan menerima hipotesis keenam.

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa hasil analisis regresi yang diperoleh koefisien konstanta sebesar 9,698, koefisien variabel pendidikan dan pelatihan (PP) sebesar -0,077, koefisien variabel pengalaman organisasi (PO) sebesar 0,273, koefisien variabel lama kerja di pemerintahan (LKP) sebesar 0,048, koefisien variabel pengalaman di DPRD (PD) sebesar -0,045, koefisien variabel jabatan di partai politik (JAB) sebesar 0,604 dan koefisien variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) sebesar 0,343. Jadi persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PADPKD = 9,698 - 0,077 PP + 0,273 PO + 0,048 LKP - 0,045 PD + 0,604 JAB + 0,343 PDTA + e}$$

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta 9,698 menunjukkan bahwa diluar variabel pendidikan dan pelatihan (PP), pengalaman organisasi (PO), lama kerja di pemerintahan (LKP), pengalaman di DPRD (PD), jabatan di partai politik (JAB) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) yang di teliti masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Jika nilai variabel pendidikan dan penelitian (PP) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka tidak akan secara signifikan mengakibatkan turunnya nilai variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) sebesar 0,077.
3. Jika nilai variabel pengalaman organisasi (PO) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka tidak akan secara signifikan mengakibatkan meningkatnya nilai variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) sebesar 0,273.
4. Jika nilai variabel lama kerja di pemerintahan (LKP) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka tidak akan secara signifikan mengakibatkan meningkatnya nilai variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) sebesar 0,048.
5. Jika nilai variabel pengalaman di DPRD (PD) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka tidak akan secara signifikan mengakibatkan turunnya nilai variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) sebesar 0,045.

6. Jika nilai variabel jabatan di partai politik (JAB) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka secara signifikan akan mengakibatkan meningkatnya nilai variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) sebesar 0,604.
7. Jika nilai variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan nilai variabel lain tetap, maka secara signifikan akan mengakibatkan meningkatnya nilai variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) sebesar 0,343.

4.1.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.432	.337	3.31595

a. Predictors: (Constant), PDTA, PO, LKP, PP, PD, JAB

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa besarnya nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,432 yang berarti variabel dependen peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (PADPKD) dapat dijelaskan oleh variabel independen pendidikan dan pelatihan (PP), pengalaman organisasi (PO), lama

kerja di pemerintahan (LKP), pengalaman di DPRD (PD) jabatan di parta politik (JAB) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA), atau 56,8 % peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dijelaskan di luar model regresi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini variabel pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menyimpulkan variabel pendidikan dan pelatihan tidak mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena data yang didapatkan dari responden pada variabel pendidikan dan pelatihan ini telah ditemukan suatu temuan yaitu sebagian besar responden yang mempunyai criteria pendidikan dan pelatihan tergolong pada kategori baik, mengisi pernyataan pada variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan skor yang rendah atau responden yang mempunyai pendidikan dan pelatihan yang rendah justru mengisi pernyataan pada variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan skor yang tinggi. Selain itu hasil penelitian ini juga dipengaruhi karena sebagian besar responden berasal dari tingkat pendidikan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 21 orang atau 48,8 %, dan sebanyak 11 orang atau 25,6 % berasal dari tingkat pendidikan SMA/ sederajat, sehingga persebaran demografi reponden menjadi tidak merata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Diduga seseorang yang memiliki pendidikan yang baik cenderung untuk mengesampingkan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menyebabkan peran seseorang tersebut menjadi tidak baik. Seperti pada fungsi pengawasan, seorang anggota dewan yang mempunyai pendidikan yang baik, cenderung lebih mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, Pada DPRD tidak ada tingkatan jawabatan berdasarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Seluruh anggota dewan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan peran pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten penelitian Kartikasari (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.2.2 Pengaruh Pengalaman Organisasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan Karena pengalaman dalam organisasi merupakan proses belajar seseorang dan kemungkinan dalam proses belajar dalam organisasi tersebut, seseorang mengalami proses belajar yang tidak sehat sehingga mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengaplikasikan hasil belajarnya tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas, seperti pengalaman yang telah didapat oleh anggota dewan

tidak diaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan salah satu fungsi DPRD yaitu melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga mengakibatkan pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.2.3 Pengaruh Lama Kerja di Pemerintahan terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini variabel lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada hasil rekap data yang didapatkan dari jawaban responden dapat diketahui bahwa anggota dewan yang mempunyai lama kerja yang tergolong tinggi mengisi jawaban pada variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan skor yang rendah dan sebaliknya anggota dewan yang mempunyai lama kerja yang tergolong rendah mengisi jawaban pada variabel peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan skor yang tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat disebabkan karena lama kerja seseorang tidak menjadi tolok ukur utama dalam mengukur peran atau keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, seperti pada penelitian ini, lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, karena tidak dapat menjadi jaminan jika semakin lama kerja seseorang di pemerintahan dapat menjamin bahwa peran dan keaktifan seseorang tersebut menjadi lebih baik. Selain itu, jabatan di DPRD juga tidak dipengaruhi oleh sudah lama atau tidaknya anggota dewan tersebut bekerja di pemerintahan.

4.2.4 Pengaruh Pengalaman di DPRD terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena pengalaman di DPRD yang dimiliki oleh anggota dewan tidak sepenuhnya mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kartikasari (2011) yang menunjukkan bahwa Pengalaman di DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.2.5 Pengaruh Jabatan di Partai Politik terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini jabatan di partai politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan jabatan di partai politik merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan keikutsertaan anggota dewan sebagai pengurus di dalam suatu partai politik. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

DPRD dapat melaksanakan perannya dengan baik apabila setiap anggota dewan mengetahui dan memahami tugas, hak dan wewenangnya masing-masing. Setiap anggota DPRD diharapkan mampu mengaplikasikan setiap tugas,

hak dan wewenang masing untuk mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

4.2.6 Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.

Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat

melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Dewi (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).



BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada DPRD tidak ada tingkatan jawabatan berdasarkan tingkat pendidikan pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Seluruh anggota dewan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan peran pengawasan keuangan daerah.
2. Pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jika seseorang mengalami proses belajar yang tidak sehat sehingga mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengaplikasikan hasil belajarnya tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas.
3. Lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Lama kerja seseorang tidak menjadi tolak ukur utama dalam mengukur peran atau keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
4. Pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pengalaman di DPRD yang dimiliki oleh anggota dewan tidak sepenuhnya mempengaruhi peran anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan keuangan daerah.

5. Jabatan di partai politik berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jabatan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi peran anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).
6. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD.

5.2.Saran

Saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini variabel pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi, lama kerja di pemerintahan dan pengalaman di DPRD tidak signifikan, hal ini kemungkinan disebabkan karena instrumen yang digunakan merupakan instrumen baru. Pada penelitian mendatang, hendaknya instrumen penelitian untuk variabel tersebut perlu dikembangkan.
2. Pengukuran variabel lama kerja di pemerintahan lebih dikembangkan dan menambah indikator yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Hery. 2009. *Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. <http://www.google.com>. (7 Desember 2012)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewi, Indah Mustika. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Dhohiri, Taufiq Rohman, dkk. 2006. *Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Yudhistira
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kartikasari, Dewi. 2012. "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Kartikasari, Dewi. 2012. "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)". *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Kawedar, Warsito, dkk. 2008. *Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: penerbit Andi
- Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. "Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating". Dalam *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Palembang: Universitas Tridianti Palembang
- Murni, Sri dan banu Witono. 2004. *Pengaruh Personal Background dan Political Background terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. *Perspektif, Vol. 9*.

Nasirwan. 2009. "Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, Transparansi kebijakan Publik dan Pendidikan/Pelatihan Sebagai Variabel Moderating". Dalam *Jurnal*.

Pramita, Yulinda devi dan Lilik Andriyani. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)". Dalam *Prosiding SNA XIII*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Korupsi Dana Fasilitas APBD: Vonis Hakim Untuk Bupati Purworejo Lebih Ringan. <http://Infokorupsi.com> (19 November 2012)

Tersangka Korupsi PNPM Ditahan. <http://Purworejo.Online.News/Korupsi.htm> (20 November 2012)

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

2000. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang *Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*

2001. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

2003. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

2003. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang *Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*

2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

2005. *Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

2009. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press

Sugiyono. 2006. *Psikologi Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Syahrudin dan Taifur. 2002. “Peranan DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi”. Dalam *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Werimon, dkk. 2007. “ Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Dalam *Prosiding SNA X*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. “Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)”. Dalam *Prosiding SNA X*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

www.purworejokab.go.id

www.wikipedia.com/2012

Yuhertiana, Indrawati. 2010. “Principal-Agent Theory Dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik”. *Jurnal*

LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian



Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian DPRD Purworejo





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS EKONOMI (FE)**

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,
Telp. 70778922 Telp/Fax. (024) 8508015, e-mail :
ekonomi@unnes.ac.id

**Yth. Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo
Di Purworejo**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata satu (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Keuangan Daerah” (Studi Kasus Pada DPRD kabupaten Purworejo)** dimohon Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner terlampir.

Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak untuk dipublikasikan. Karenanya, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Seperti layaknya penelitian ilmiah, saya menjamin kerahasiaan identitas dan semua pendapat/opini/jawaban dari Bapak/Ibu. Kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi saya.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu luangkan dalam mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nurul Fitri 'Amalia

NIM. 7211409051

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Mohon diisi dengan memberikan tanda (X) pada pernyataan pilihan, serta jawab secara singkat dan jelas pada pernyataan isian.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a. Pria
b. Wanita
3. Strata Pendidikan : a. SMA/ Sederajat d. S2 (Master)
b. D3 (Diploma) e. S3 (Doktor)
c. S1 (Sarjana)
4. Lama Kerja di
Pemerintahan : tahun
(termasuk sebagai anggota DPRD)
5. Jabatan di Partai Politik :

Petunjuk Pengisian

Berikan tanda (X) pada kolom alternatif yang tersedia untuk jawaban yang paling tepat menurut persepsi Bapak/ Ibu.

Keterangan:

- | | | | |
|-----|--------------------------------|----|--------------------------|
| STS | : Sangat Tidak Setuju (Skor 1) | S | : Setuju (Skor 4) |
| TS | : Tidak Setuju (Skor 2) | SS | : Sangat Setuju (Skor 5) |
| TT | : Tidak Tahu (Skor 3) | | |

A. Pendidikan dan Pelatihan

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Jenjang pendidikan Bapak/Ibu mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
2.	Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu relevan dengan pelaksanaan tugas.					
3.	Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
4.	Sertifikasi yang diperoleh Bapak/Ibu dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas.					
5.	Bapak/Ibu telah mengikuti berbagai pelatihan.					
6.	Pelatihan yang pernah diikuti memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi Bapak/Ibu.					
7.	Pendidikan Bapak/Ibu bermanfaat dalam menangani kasus-kasus tertentu.					

B. Pengalaman Organisasi

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Pengalaman Organisasi Bapak/Ibu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bapak/Ibu saat ini.					
2.	Semakin lama Bapak/Ibu mengikuti suatu organisasi, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.					

3.	Cara berfikir Bapak/Ibu saat ini merupakan buah dari pengalaman organisasi yang digeluti selama ini.					
4.	Pengalaman organisasi Bapak/ Ibu melatih manajemen dalam suatu organisasi.					
5.	Pengalaman organisasi Bapak/Ibu mempengaruhi keahlian dalam suatu organisasi.					

C. Pengalaman di DPRD

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Masa kerja Bapak/Ibu di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas.					
2.	Pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas.					
3.	Pengalaman Bapak/Ibu di DPRD memberikan pembelajaran bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan cara bersama-sama.					
4.	Bapak/Ibu selalu menangani setiap tugas dengan baik.					
5.	Bapak/Ibu terlibat dalam penanganan kasus penyalahgunaan dana PNPM tahun 2010.					

D. Jabatan di Partai Politik

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Jabatan Bapak/Ibu melatih tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.					
2.	Jabatan Bapak/Ibu memotivasi dalam melaksanakan tugas.					
3.	Sebagai seorang atasan, Bapak/Ibu dituntut untuk memberikan kebijakan yang baik.					
4.	Lama waktu Bapak/Ibu menjabat dalam suatu partai politik memberikan pengalaman dalam pelaksanaan tugas.					
5.	Jabatan Bapak/Ibu memberikan peluang bagi Bapak/Ibu untuk melakukan suatu kecurangan.					
6.	Pengalaman menjabat di partai politik menjadikan Bapak/Ibu lebih bijaksana.					
7.	Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, Bapak/Ibu harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik.					

E. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi.					
2.	APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah.					

3.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
4.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingka I ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.					
5.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat II ditujukan kepada Gubernur.					
6.	Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.					
7.	DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.					
8.	Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
9.	Jumlah anggaran yang disetujui Dewan legislatif harus dimanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien.					

Sumber: Pramita dan Andriyani (2010)

F. Peran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

No.	Pertanyaan	SS	S	TT	TS	STS
1.	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan Umum APBD.					

2.	Analisis politik selalu dilakukan dalam proses penyusunan APBD.					
3.	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.					
4.	Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah.					
5.	Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.					
6.	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah.					
7.	Anggota dewan melakukan evaluasi APBD yang mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.					
8.	Anggota dewan meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati.					
9.	Anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD.					
10.	Anggota dewan aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.					

Sumber : Kartikasari (2012)

TABEL PERHITUNGAN KUESIONER

Jenis kelamin, Strata Pendidikan Jabatan di Partai Politik

No	Jenis Kelamin		Strata Pendidikan					Jabatan di Partai Politik		
	P	W	SMA	D3	S1	S2	S3	Anggota	Pengurus	Ketua/ Majelis Partai
1	1				1				1	
2	1					1		1		
3	1		1						1	
4	1				1				1	
5	1				1				1	
6	1			1				1		
7		1	1						1	
8	1				1					1
9	1					1				1
10	1		1							1
11	1				1					1
12		1	1						1	
13		1			1			1		
14	1				1			1		
15	1					1			1	
16	1					1			1	
17	1		1						1	
18		1			1				1	
19		1	1					1		
20	1				1					1
21	1			1				1		
22	1				1			1		
23	1					1		1		
24	1					1		1		
25	1				1				1	
26	1				1				1	
27	1				1			1		
28	1				1			1		
29	1				1			1		
30	1				1			1		
31	1		1							1

32		1	1					1		
33	1					1		1		
34	1			1				1		
35		1			1			1		
36	1			1				1		
37		1	1					1		
38	1				1			1		
39	1		1					1		
40	1				1			1		
41	1				1			1		
42	1		1					1		
43	1				1			1		



TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Pendidikan dan Pelatihan (PP)

No	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	Total PP
1	5	4	5	3	5	5	5	32
2	5	4	4	4	4	4	3	28
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	5	4	4	4	29
5	4	5	4	5	5	5	4	32
6	4	4	4	3	4	4	3	26
7	5	4	4	4	4	4	4	29
8	4	3	5	3	3	4	5	27
9	2	4	4	2	4	4	4	24
10	4	4	4	2	4	5	4	27
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	5	4	4	4	5	5	5	32
13	5	2	4	5	5	5	4	30
14	5	5	5	5	4	4	4	32
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	2	2	4	4	4	4	2	22
17	5	5	5	5	5	5	5	35
18	4	4	4	5	5	5	4	31
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	5	4	4	4	5	30

21	4	4	5	4	4	4	5	30
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	4	4	4	4	5	4	29
24	5	5	5	5	5	5	5	35
25	4	4	4	5	5	5	4	31
26	4	4	4	4	4	4	5	29
27	5	5	5	4	4	4	4	31
28	5	5	5	4	4	4	4	31
29	5	4	4	5	4	5	5	32
30	4	4	4	5	5	5	4	31
31	5	5	5	5	4	4	5	33
32	4	4	5	5	4	4	5	31
33	4	4	5	4	4	4	5	30
34	5	5	5	5	4	5	5	34
35	5	5	5	4	4	4	4	31
36	5	5	5	4	4	4	4	31
37	5	5	5	4	4	4	4	31
38	5	5	5	4	4	4	4	31
39	5	5	5	4	4	4	4	31
40	4	4	5	4	4	4	5	30
41	4	4	5	5	4	4	5	31
42	4	4	5	4	4	4	5	30
43	4	4	5	4	4	4	5	30

TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Pendidikan dan Pelatihan (PP)

No	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	Total PO
1	4	5	5	4	4	22
2	3	4	4	4	4	19
3	5	5	4	4	4	22
4	5	4	4	4	4	21
5	4	5	5	4	5	23
6	4	4	4	4	4	20
7	5	4	4	4	4	21
8	4	4	3	4	4	19
9	4	4	2	4	2	16
10	4	5	4	5	4	22
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	5	21
13	4	5	4	5	5	23
14	4	5	4	4	5	22
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	4	4	4	22
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20
20	4	5	4	4	4	21

21	4	4	3	4	4	19
22	5	4	4	4	4	21
23	3	4	4	4	4	19
24	4	5	5	5	5	24
25	2	4	4	4	4	18
26	4	4	5	4	3	20
27	2	4	4	4	4	18
28	2	4	4	4	4	18
29	2	5	4	4	4	19
30	5	5	5	5	4	24
31	1	5	5	5	4	20
32	4	4	3	4	5	20
33	4	4	3	4	4	19
34	1	4	4	5	5	19
35	2	4	4	4	4	18
36	2	4	4	4	4	18
37	2	4	4	4	4	18
38	5	4	4	4	4	21
39	5	4	4	4	4	21
40	4	4	3	4	4	19
41	4	4	5	4	4	21
42	4	4	3	4	4	19
43	4	4	3	4	4	19

TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Lama Kerja di Pemerintahan (LKP)

No	Lama Tahun
1	3.5
2	4.0
3	10.0
4	4.0
5	3.5
6	4.0
7	3.5
8	3.0
9	4.0
10	10.0
11	4.0
12	4.0
13	4.0
14	4.0
15	4.0
16	4.0
17	2.0
18	4.0
19	4.0
20	4.0
21	4.0
22	5.0

No	Lama Tahun
23	4.0
24	7.0
25	9.0
26	4.0
27	10.0
28	4.0
29	4.0
30	8.0
31	4.0
32	4.0
33	5.0
34	6.0
35	5.0
36	4.0
37	4.0
38	10.0
39	4.0
40	5.0
41	4.0
42	4.0
43	4.0

TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Pengalaman di DPRD (PD)

No	PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	Total PD
1	5	4	5	5	2	21
2	4	4	4	4	1	17
3	4	4	2	2	3	15
4	4	4	4	4	2	18
5	5	5	5	4	3	22
6	4	5	5	4	1	19
7	5	5	4	4	3	21
8	4	4	4	3	1	16
9	4	4	4	4	1	17
10	4	5	4	4	2	19
11	4	4	4	4	2	18
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	4	2	2	18
14	5	5	5	3	3	21
15	5	5	1	4	1	16
16	4	4	2	4	2	16
17	4	4	5	5	2	20
18	5	5	5	4	4	23

19	4	4	4	4	3	19
20	4	4	3	4	3	18
21	4	4	4	4	3	19
22	4	4	5	4	3	20
23	4	4	4	4	3	19
24	5	5	5	5	2	22
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	3	19
27	4	4	2	5	5	20
28	4	4	2	5	1	16
29	5	4	5	4	1	19
30	5	5	5	4	1	20
31	5	5	4	5	1	20
32	5	4	4	4	3	20
33	4	4	4	4	3	19
34	5	5	5	3	2	20
35	4	4	3	4	2	17
36	4	4	3	4	5	20
37	4	4	3	4	1	16
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	5	21
40	5	5	4	4	3	21

41	4	4	4	3	3	18
42	4	4	4	4	3	19
43	4	4	3	4	3	18



TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Jabatan di Partai Politik (Jab)

No	Jab1	Jab2	Jab3	Jab4	Jab5	Jab6	Jab7	Total Jab
1	4	4	5	5	1	5	5	29
2	4	4	4	4	1	4	2	23
3	4	4	4	4	2	2	2	22
4	4	4	4	4	1	4	1	22
5	5	5	5	4	2	5	4	30
6	5	4	5	4	1	5	4	28
7	4	4	4	4	1	4	4	25
8	2	3	4	2	4	4	2	21
9	4	4	4	4	2	4	2	24
10	4	4	5	5	1	4	4	27
11	4	4	4	4	2	4	2	24
12	4	4	5	5	3	4	2	27
13	4	4	4	5	2	4	2	25
14	4	4	5	5	4	5	3	30
15	4	4	5	5	2	5	1	26
16	4	4	4	4	2	4	4	26
17	5	5	5	5	1	5	2	28
18	5	5	4	4	1	4	2	25
19	5	5	5	5	5	5	5	35
20	4	4	3	4	3	4	4	26

21	4	4	4	4	3	4	3	26
22	4	5	5	5	2	5	4	30
23	4	4	5	4	1	5	4	27
24	5	5	5	5	2	5	2	29
25	4	4	5	4	2	4	2	25
26	4	4	3	4	3	4	4	26
27	4	4	4	4	1	4	2	23
28	4	4	4	4	1	4	2	23
29	4	4	4	5	1	5	3	26
30	5	4	5	5	1	5	4	29
31	5	5	5	5	1	5	5	31
32	4	4	5	4	3	4	3	27
33	4	4	4	4	3	4	3	26
34	5	5	5	5	1	5	5	31
35	4	5	4	5	1	4	2	25
36	4	4	4	5	1	4	2	24
37	5	5	4	5	1	5	2	27
38	5	5	4	5	1	5	2	27
39	5	5	4	5	1	5	2	27
40	4	4	4	4	3	4	3	26
41	4	4	5	4	2	4	4	27
42	4	4	4	4	3	4	3	26
43	4	4	2	4	2	4	4	24

TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (PDTA)

No	PDTA1	PDTA2	PDTA3	PDTA4	PDTA5	PDTA6	PDTA7	PDTA8	PDTA9	Total PDTA
1	3	5	3	4	4	4	3	5	5	36
2	4	5	2	4	4	4	4	4	4	35
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	2	2	4	2	2	4	4	4	4	28
5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39
6	1	5	5	5	5	5	5	5	5	41
7	2	4	4	4	4	4	4	4	5	35
8	3	4	2	2	2	2	4	4	4	27
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	2	4	4	4	4	4	5	35
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	1	4	2	4	4	4	4	4	4	31
13	2	4	4	4	4	4	4	4	5	35
14	3	5	5	4	4	4	5	5	5	40
15	3	5	2	5	4	4	4	4	4	35
16	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
17	1	5	5	4	4	5	5	5	5	39
18	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	4	4	3	3	2	4	4	4	4	32

21	2	4	2	4	4	4	3	4	4	31
22	5	5	4	5	4	5	5	5	5	43
23	2	5	4	4	4	4	4	4	5	36
24	4	5	4	5	5	5	5	5	5	43
25	4	5	2	4	4	4	4	5	5	37
26	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
27	4	4	2	4	4	5	4	5	4	36
28	4	4	2	4	4	5	4	5	4	36
29	4	4	2	4	4	5	5	5	5	38
30	5	4	3	4	4	4	4	5	4	37
31	1	5	1	1	1	5	5	5	5	29
32	2	3	4	4	5	4	3	4	5	34
33	2	4	2	5	5	5	3	4	4	34
34	2	5	1	4	5	5	5	5	5	37
35	4	5	2	4	2	4	4	5	5	35
36	4	5	2	4	2	4	4	5	5	35
37	4	5	2	4	2	4	4	5	5	35
38	4	4	2	4	2	4	4	5	5	34
39	4	4	2	4	2	4	4	5	5	34
40	2	5	3	5	4	4	3	4	4	34
41	2	4	2	3	3	4	4	4	4	30
42	2	4	2	4	4	4	3	4	4	31
43	4	4	2	2	2	4	2	3	4	27

TABEL PERHITUNGAN KUESIONER
Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (PADPKD)

No	PADPKD 1	PADPKD 2	PADPKD 3	PADPKD 4	PADPKD 5	PADPKD 6	PADPKD 7	PADPKD 8	PADPKD 9	PADPK D 10	Total PADPKD
1	4	3	5	4	5	5	3	5	5	2	41
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
4	5	2	4	4	5	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	4	5	4	4	5	2	4	43
6	5	3	5	3	4	4	4	4	5	5	42
7	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
8	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	31
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	39
11	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	44
12	4	4	4	4	4	4	2	2	1	4	33
13	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
14	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	5	1	5	5	5	5	5	5	2	5	43
18	4	4	5	4	5	5	2	4	4	4	41
19	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
20	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	36
21	4	4	4	4	5	4	4	4	3	2	38

22	5	4	5	2	5	5	4	4	5	5	44
23	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	42
24	5	5	5	2	5	5	5	5	5	2	44
25	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	47
26	4	4	4	3	4	4	4	4	3	2	36
27	4	4	4	4	4	4	1	4	4	2	35
28	4	4	4	5	4	4	1	4	4	2	36
29	5	4	5	4	4	2	4	5	4	4	41
30	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42
31	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	48
32	4	5	4	4	5	4	5	5	3	1	40
33	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	43
34	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
35	5	5	4	4	4	4	1	4	4	2	37
36	5	4	4	4	4	4	1	4	4	2	36
37	4	4	4	4	4	4	1	4	4	2	35
38	4	4	4	4	4	4	1	4	4	2	35
39	4	4	4	4	4	5	1	4	4	2	36
40	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	38
41	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	37
42	4	4	4	4	4	5	4	4	3	2	38
43	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	37

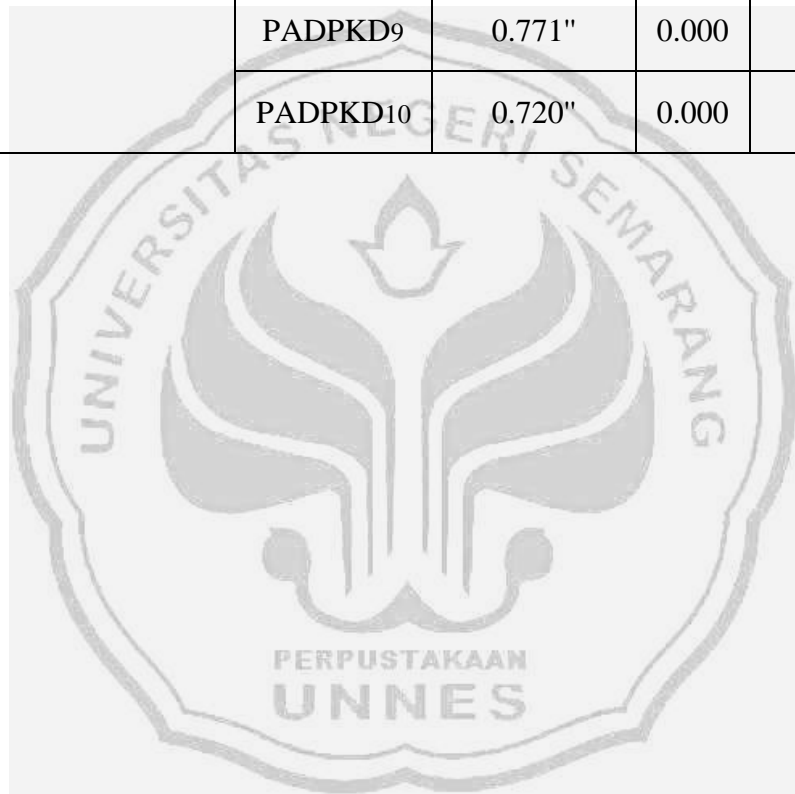
LAMPIRAN 5

Ringkasan Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlations</i>	Sig	Keterangan
1.	Pendidikan dan pelatihan	PP1	0.635"	0.000	Valid
		PP2	0.502"	0.005	Valid
		PP3	0.401'	0.028	Valid
		PP4	0.745"	0.000	Valid
		PP5	0.703"	0.000	Valid
		PP6	0.686"	0.000	Valid
		PP7	0.612"	0.000	Valid
2.	Pengalaman Organisasi	PO1	0.452"	0.012	Valid
		PO2	0.564"	0.001	Valid
		PO3	0.737"	0.000	Valid
		PO4	0.676"	0.000	Valid
		PO5	0.477"	0.008	Valid
3.	Pengalaman di DPRD	PD1	0.737"	0.000	Valid
		PD2	0.703"	0.000	Valid
		PD3	0.572"	0.001	Valid

		PD4	0.632"	0.000	Valid
		PD5	0.576"	0.001	Valid
4.	Jabatan di Partai Politik	JAB1	0.731"	0.000	Valid
		JAB2	0.681"	0.000	Valid
		JAB3	0.586"	0.001	Valid
		JAB4	0.692"	0.000	Valid
		JAB5	0.476"	0.008	Valid
		JAB6	0.777"	0.000	Valid
		JAB7	0.647"	0.000	Valid
5.	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	PDTA1	0.566"	0.001	Valid
		PDTA2	0.614"	0.000	Valid
		PDTA3	0.703"	0.000	Valid
		PDTA4	0.744"	0.000	Valid
		PDTA5	0.684"	0.000	Valid
		PDTA6	0.667"	0.000	Valid
		PDTA7	0.543"	0.002	Valid
		PDTA8	0.543"	0.002	Valid
		PDTA9	0.367'	0.046	Valid
6.	Peran Anggota Dewan terhadap Pengawasan keuangan Daerah	PADPKD1	0.775"	0.000	Valid
		PADPKD2	0.611"	0.000	Valid
		PADPKD3	0.553"	0.002	Valid

		PADPKD4	0.721"	0.000	Valid
		PADPKD5	0.781"	0.000	Valid
		PADPKD6	0.541"	0.002	Valid
		PADPKD7	0.549"	0.002	Valid
		PADPKD8	0.431'	0.017	Valid
		PADPKD9	0.771"	0.000	Valid
		PADPKD10	0.720"	0.000	Valid



LAMPIRAN 6

Output Uji Validitas dan Reliabilitas

A. Pendidikan dan Pelatihan (PP)

Correlations

		total	pertanyaan 1	pertanyaan 2	pertanyaan 3	pertanyaan 4	pertanyaan5	pertanyaan6	pertanyaan7
total	Pearson Correlation	1	.635**	.502**	.401*	.745**	.703**	.686**	.612**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.028	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
pertanyaan1	Pearson Correlation	.635**	1	.264	.323	.332	.277	.360	.310
	Sig. (2-tailed)	.000		.158	.081	.073	.139	.051	.095
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
pertanyaan2	Pearson Correlation	.502**	.264	1	-.047	.151	.132	.239	.262
	Sig. (2-tailed)	.005	.158		.806	.426	.488	.204	.163
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
pertanyaan3	Pearson Correlation	.401*	.323	-.047	1	.142	.244	.124	.136
	Sig. (2-tailed)	.028	.081	.806		.455	.193	.515	.475
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

pertanyaan4	Pearson Correlation	.745**	.332	.151	.142	1	.592**	.505**	.472**
	Sig. (2-tailed)	.000	.073	.426	.455		.001	.004	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
pertanyaan5	Pearson Correlation	.703**	.277	.132	.244	.592**	1	.268	.104
	Sig. (2-tailed)	.000	.139	.488	.193	.001		.153	.584
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
pertanyaan6	Pearson Correlation	.686**	.360	.239	.124	.505**	.268	1	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000	.051	.204	.515	.004	.153		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
pertanyaan7	Pearson Correlation	.612**	.310	.262	.136	.472**	.104	.727**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.095	.163	.475	.008	.584	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	8

PERPUSTAKAAN
UNNES

B. Pengalaman Organisasi (PO)**Correlations**

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006
VAR00001	Pearson Correlation	1	.452*	.564**	.737**	.676**	.477**
	Sig. (2-tailed)		.012	.001	.000	.000	.008
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00002	Pearson Correlation	.452*	1	-.255	.040	.173	-.122
	Sig. (2-tailed)	.012		.174	.833	.360	.521
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00003	Pearson Correlation	.564**	-.255	1	.543**	.333	.333
	Sig. (2-tailed)	.001	.174		.002	.072	.072
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00004	Pearson Correlation	.737**	.040	.543**	1	.521**	.169
	Sig. (2-tailed)	.000	.833	.002		.003	.372
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00005	Pearson Correlation	.676**	.173	.333	.521**	1	.153
	Sig. (2-tailed)	.000	.360	.072	.003		.420

N		30	30	30	30	30	30
VAR00006	Pearson Correlation	.477**	-.122	.333	.169	.153	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.521	.072	.372	.420	
N		30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	6

C. Pengalaman di DPRD (PD)

Correlations

		Total	Pertanyaan1	Pertanyaan2	Pertanyaan3	Pertanyaan4	Pertanyaan5	Pertanyaan6
Total	Pearson Correlation	1	.605**	.476**	.254	.511**	.568**	.403*
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.176	.004	.001	.027
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan1	Pearson Correlation	.605**	1	.491**	-.240	.169	.483**	.144

	Sig. (2-tailed)	.000		.006	.201	.371	.007	.448
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan2	Pearson Correlation	.476**	.491**	1	-.198	.407*	.301	-.111
	Sig. (2-tailed)	.008	.006		.294	.026	.106	.559
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan3	Pearson Correlation	.254	-.240	-.198	1	-.074	-.062	-.184
	Sig. (2-tailed)	.176	.201	.294		.696	.744	.331
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan4	Pearson Correlation	.511**	.169	.407*	-.074	1	.216	.049
	Sig. (2-tailed)	.004	.371	.026	.696		.251	.796
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan5	Pearson Correlation	.568**	.483**	.301	-.062	.216	1	-.113
	Sig. (2-tailed)	.001	.007	.106	.744	.251		.551
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan6	Pearson Correlation	.403*	.144	-.111	-.184	.049	-.113	1
	Sig. (2-tailed)	.027	.448	.559	.331	.796	.551	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	8



E. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (PDTA)

Correlations

	Total	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P12
Total Pearson Correlation	1	.566**	.614**	.703**	.744**	.684**	.667**	.543**	.543**	.367*
Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.002	.046
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3 Pearson Correlation	.566**	1	.230	.153	.531**	.473**	.305	.231	.159	-.070
Sig. (2-tailed)	.001		.220	.418	.003	.008	.101	.218	.401	.713
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4 Pearson Correlation	.614**	.230	1	.650**	.271	.477**	.225	.041	.203	.061
Sig. (2-tailed)	.000	.220		.000	.147	.008	.232	.831	.282	.747
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5 Pearson Correlation	.703**	.153	.650**	1	.359	.382*	.400*	.209	.398*	.090
Sig. (2-tailed)	.000	.418	.000		.051	.037	.029	.268	.029	.636
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6 Pearson Correlation	.744**	.531**	.271	.359	1	.550**	.415*	.468**	.281	.227
Sig. (2-tailed)	.000	.003	.147	.051		.002	.023	.009	.133	.228
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7 Pearson Correlation	.684**	.473**	.477**	.382*	.550**	1	.539**	.141	.063	.028

	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.008	.037	.002		.002	.457	.742	.881
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.667**	.305	.225	.400*	.415*	.539**	1	.238	.342	.273
	Sig. (2-tailed)	.000	.101	.232	.029	.023	.002		.205	.064	.144
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.543**	.231	.041	.209	.468**	.141	.238	1	.439*	.348
	Sig. (2-tailed)	.002	.218	.831	.268	.009	.457	.205		.015	.059
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.543**	.159	.203	.398*	.281	.063	.342	.439*	1	.178
	Sig. (2-tailed)	.002	.401	.282	.029	.133	.742	.064	.015		.346
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.367*	-.070	.061	.090	.227	.028	.273	.348	.178	1
	Sig. (2-tailed)	.046	.713	.747	.636	.228	.881	.144	.059	.346	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	10

F. Peran Anggota Dewan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (PADPKD)

Correlations

	Total PADPK D	Pertanya an1	Pertanya an2	Pertanya an3	Pertanya an4	Pertanya an5	Pertanya an6	Pertanya an7	Pertanya an8	Pertanya an9	Pertanya an10
TotalPADPKD	1	.775**	.611**	.553**	.721**	.781**	.541**	.549**	.431*	.771**	.720**
Pearson Correlation											
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000	.000	.002	.002	.017	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan1	.775**	1	.427*	.310	.626**	.522**	.464**	.370*	.178	.544**	.497**
Pearson Correlation											
Sig. (2-tailed)	.000		.019	.096	.000	.003	.010	.044	.348	.002	.005
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan2	.611**	.427*	1	.400*	.317	.398*	.111	.319	.144	.406*	.362*
Pearson Correlation											
Sig. (2-tailed)	.000	.019		.029	.088	.029	.559	.086	.447	.026	.050
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan3	.553**	.310	.400*	1	.365*	.466**	.037	.107	.528**	.242	.091
Pearson Correlation											
Sig. (2-tailed)	.002	.096	.029		.047	.009	.844	.572	.003	.198	.631

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan4	Pearson Correlation	.721**	.626**	.317	.365*	1	.522**	.464**	.370*	.109	.442*	.365*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.088	.047		.003	.010	.044	.565	.014	.048
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan5	Pearson Correlation	.781**	.522**	.398*	.466**	.522**	1	.243	.186	.497**	.613**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.029	.009	.003		.197	.324	.005	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan6	Pearson Correlation	.541**	.464**	.111	.037	.464**	.243	1	.490**	-.108	.384*	.411*
	Sig. (2-tailed)	.002	.010	.559	.844	.010	.197		.006	.571	.036	.024
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan7	Pearson Correlation	.549**	.370*	.319	.107	.370*	.186	.490**	1	.050	.352	.362*
	Sig. (2-tailed)	.002	.044	.086	.572	.044	.324	.006		.794	.057	.049
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan8	Pearson Correlation	.431*	.178	.144	.528**	.109	.497**	-.108	.050	1	.234	.282
	Sig. (2-tailed)	.017	.348	.447	.003	.565	.005	.571	.794		.214	.131

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan9	Pearson Correlation	.771**	.544**	.406*	.242	.442*	.613**	.384*	.352	.234	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.026	.198	.014	.000	.036	.057	.214		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan10	Pearson Correlation	.720**	.497**	.362*	.091	.365*	.622**	.411*	.362*	.282	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.050	.631	.048	.000	.024	.049	.131	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	11



LAMPIRAN 7

Output Statistik Deskriptif

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	35	81.4	81.4	81.4
Wanita	8	18.6	18.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Strata Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/ Sederajat	11	25.6	25.6	25.6
D3 (Diploma)	4	9.3	9.3	34.9
S1 (Sarjana)	21	48.8	48.8	83.7
S2 (Master)	7	16.3	16.3	100.0

Jabatan di Partai Politik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Anggota	25	58.1	58.1	58.1
	Pengurus	12	27.9	27.9	86.0
	Ketua/ Majelis Partai	6	14.0	14.0	100.0
	Total	43	100.0	100.0	



Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	43	13.00	22.00	35.00	30.1395	2.62390
PO	43	8.00	16.00	24.00	19.3023	1.48861
LKP	43	8.00	2.00	10.00	4.8721	2.04151
PD	43	8.00	15.00	23.00	19.0000	1.85164
JAB	43	14.00	21.00	35.00	26.3953	2.76147
PDTA	43	18.00	27.00	45.00	35.1860	3.95965
Valid N (listwise)	43					



LAMPIRAN 8

Output Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	43	-5.63967	7.46595	2.881900 9E-15	3.06996886	.655	.361	.404	.709
Valid N (listwise)	43								

B. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

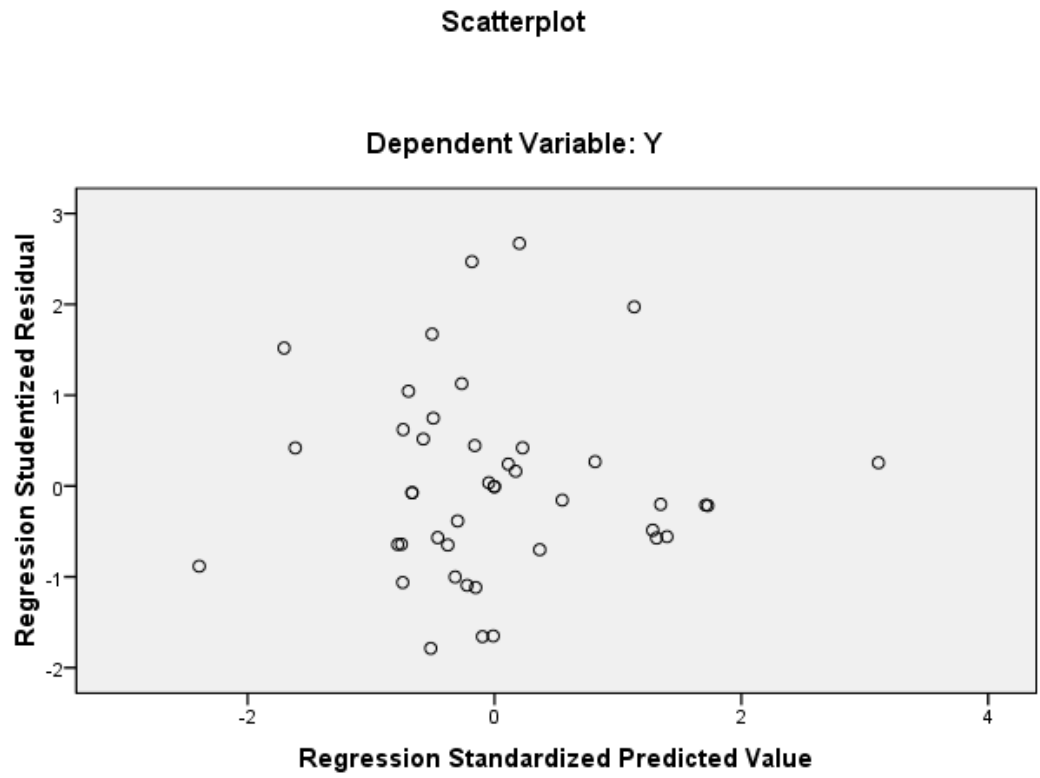
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.698	8.583		1.130	.266		
	PP	-.077	.230	-.050	-.337	.738	.722	1.385

PO	.273	.382	.100	.714	.480	.808	1.238
LKP	.048	.258	.024	.186	.854	.942	1.062
PD	-.045	.341	-.020	-.131	.896	.658	1.519
JAB	.604	.247	.409	2.447	.019	.564	1.774
PDTA	.343	.158	.333	2.169	.037	.668	1.498

a. Dependent Variable: Y



C. Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 9

Output Hasil Analisis Regresi Berganda

A. Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.698	8.583		1.130	.266		
PP	-.077	.230	-.050	-.337	.738	.722	1.385
PO	.273	.382	.100	.714	.480	.808	1.238
LKP	.048	.258	.024	.186	.854	.942	1.062
PD	-.045	.341	-.020	-.131	.896	.658	1.519
JAB	.604	.247	.409	2.447	.019	.564	1.774
PDTA	.343	.158	.333	2.169	.037	.668	1.498

a. Dependent Variable: Y

B. Nilai R^2 **Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.657 ^a	.432	.337	3.31595

a. Predictors: (Constant), PDTA, PO, LKP, PP, PD, JAB

b. Dependent Variable: Y

